

Pengertian Bela Negara

Bela Negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam masalah pembelaan negara. Hal tersebut merupakan wujud kecintaan seorang warga negara pada tanah air yang sudah memberikan kehidupan padanya. Hal ini terjadi sejak seseorang lahir, tumbuh dewasa serta dalam upayanya mencari penghidupan.

Secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut, sedangkan secara non-fisik konsep ini diartikan sebagai upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut. Dalam pelaksanaan pembelaan negara, seorang warga bisa melakukannya baik secara fisik maupun non fisik. Pembelaan negara secara fisik diantaranya dengan cara perjuangan mengangkat senjata apabila ada serangan dari negara asing terhadap kedaulatan bangsa.

Sementara, pembelaan negara secara non fisik diartikan sebagai semua usaha untuk menjaga bangsa serta kedaulatan negara melalui proses peningkatan nasionalisme. Nasionalisme adalah rangkaian kecintaan dan kesadaran dalam proses berkehidupan dalam negara dan bangsa, serta upaya untuk menumbuhkan rasa cinta pada tanah air. Selain itu, pembelaan bisa dilakukan dengan cara menumbuhkan keaktifan dalam berperan aktif untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara.

Landasan konsep bela negara adalah adanya wajib militer. Subyek dari konsep ini adalah tentara atau perangkat pertahanan negara lainnya, baik sebagai pekerjaan yang dipilih atau sebagai akibat dari rancangan tanpa sadar (wajib militer). Beberapa negara (misalnya Israel, Iran) dan Singapura memberlakukan wajib militer bagi warga yang memenuhi syarat (kecuali dengan dispensasi untuk

alasan tertentu seperti gangguan fisik, mental atau keyakinan keagamaan). Sebuah bangsa dengan relawan sepenuhnya militer, biasanya tidak memerlukan layanan dari wajib militer warganya, kecuali dihadapkan dengan krisis perekrutan selama masa perang.

Di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Jerman, Spanyol dan Inggris, bela negara dilaksanakan pelatihan militer, biasanya satu akhir pekan dalam sebulan. Mereka dapat melakukannya sebagai individu atau sebagai anggota resimen, misalnya Tentara Teritorial Britania Raya. Dalam beberapa kasus milisi bisa merupakan bagian dari pasukan cadangan militer, seperti Amerika Serikat National Guard.

Di negara lain, seperti Republik China (Taiwan), Republik Korea, dan Israel, wajib untuk beberapa tahun setelah seseorang menyelesaikan dinas nasional. Sebuah pasukan cadangan militer berbeda dari pembentukan cadangan, kadang-kadang disebut sebagai cadangan militer, yang merupakan kelompok atau unit personel militer tidak berkomitmen untuk pertempuran oleh komandan mereka sehingga mereka tersedia untuk menangani situasi tak terduga, memperkuat pertahanan negara.

Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan “bela negara” ? Kamus Umum Bahasa Indonesia mengartikan istilah “bela” sebagai menjaga baik-baik, memelihara, merawat, melepaskan dari bahaya, memihak untuk melindungi dan mempertahankan sesuatu. Sesuatu yang harus dijaga, dipelihara, dirawat, dilindungi dan dipertahankan dalam konteks ini adalah negara. Tegasnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan demikian “membela negara” dapat diartikan sebagai menjaga, memelihara, melindungi dan mempertahankan eksistensi negara bahkan melepaskannya dari bahaya. Kemudian muncul pertanyaan : “Mengapa negara harus dibela ?” Jawabannya sederhana, yaitu karena negara sebagai kesatuan politik masyarakat memegang peran dan fungsi yang sangat besar dan penting bagi setiap dan segenap warganya dalam kerangka pengembangan dirinya sebagai manusia maupun sebagai bangsa.

Dalam konteks ini setiap negara manapun di dunia ini memangku dan mengemban tiga tugas pokok, yaitu : a. Melindungi seluruh penduduk dalam wilayah kekuasaannya terhadap : 1). Segala ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. 2). Ancaman penyakit dan/atau segala bentuk bahaya lainnya, termasuk bencana alam, bahaya lalu lintas, terorisme, narkoba, ideologi-ideologi berbahaya dan lainlain. b. Mendukung atau langsung menyediakan pelbagai pelayanan bagi kehidupan masyarakat dalam dalam bidang sosial, ekonomi dan kebudayaan termasuk pelayanan kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, fasilitas komunikasi dan belbagai pelayanan sosial lain. Negara juga mengembangkan upaya meningkatkan kemampuan warganya minimal dapat bebas dari kemiskinan dan ketergantungan ekonominya. c. Menjadi wasit yang tidak memihak kepada salah satu pihak dalam suatu konflik sosial dengan menyediakan suatu sistem peradilan yang menjamin keadilan yang mendasar dalam hubungan sosial masyarakat. Singkatnya oleh negara, harapan serta cita-cita setiap dan semua warganya dapat terwujud. Atau dengan kata lain tanpa negara semua harapan dan cita-cita warga negara sulit dibayangkan. Namun demikian untuk keberhasilan tugas pokok negara secara umum tersebut diatas dalam hal ini, Republik Indonesia yang memiliki tujuan nasional (yang diamanatkan dalam alinea ke empat UUD 1945) diperlukan timbal balik dari setiap warganya. Timbal balik tersebut adalah adanya hak dan kewajiban ikut serta dalam upaya bela negara.

Pengertian Bela Negara di Indonesia

Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya.

Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Spektrum bela negara itu sangat luas, dari yang paling halus, hingga yang paling keras. Mulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata.

Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan Negara.

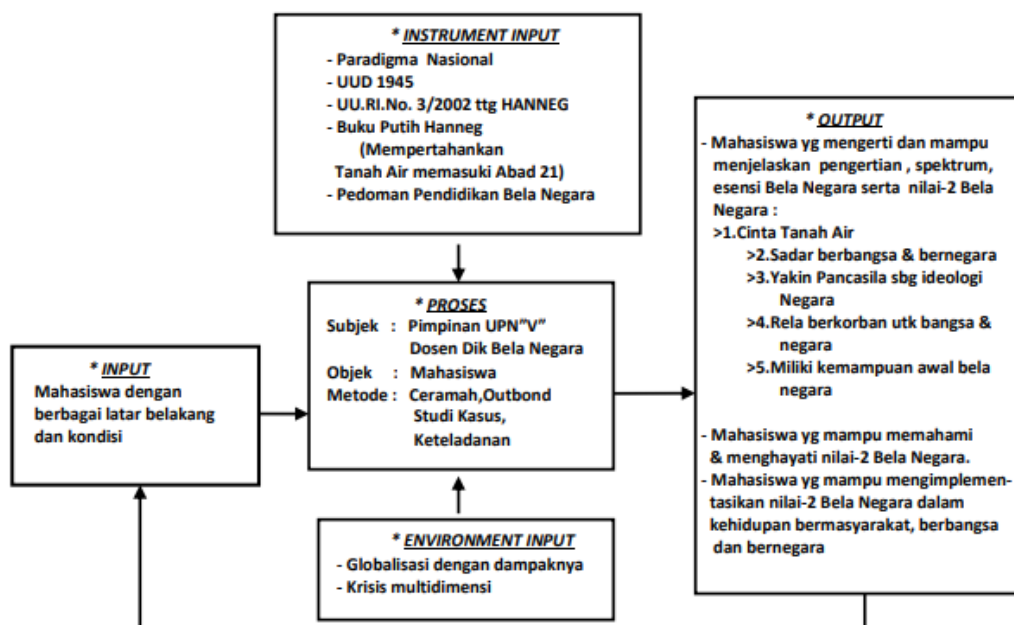
Di Indonesia proses pembelaan negara sudah diatur secara formal ke dalam Undang-undang. Diantaranya sudah disebutkan ke dalam Pancasila serta Undang-undang Dasar 1945, khususnya pasal 30. Didalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa membela bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Dengan melaksanakan kewajiban bela bangsa tersebut, merupakan bukti dan proses bagi seluruh warga negara untuk menunjukkan kesediaan mereka dalam berbakti pada nusa dan bangsa, serta kesadaran untuk mengorbankan diri guna membela negara. Pemahaman bela negara itu sendiri demikian luas, mulai dari pemahaman yang halus hingga keras.

Diantaranya dimulai dengan terbinanya hubungan baik antar sesama warga negara hingga proses kerjasama untuk menghadapi ancaman dari pihak asing secara nyata. Hal ini merupakan sebuah bukti adanya rasa nasionalisme yang diejawantahkan ke dalam sebuah sikap dan perilaku warga negara dalam posisinya sebagai warga negara. Didalam konsep pembelaan negara, terdapat falsafah mengenai cara bersikap dan bertindak yang terbaik untuk negara dan bangsa.

1.2. Perlunya Pendidikan Bela Negara. Patut disadari sepenuhnya bahwa kesadaran bela negara bukanlah sesuatu yang tumbuh dengan sendirinya dalam diri setiap warga negara. Diperlukan upaya-upaya sadar dan terencana secara matang untuk menanamkan dalam diri warga negara landasan dan nilai-nilai bela negara sebagai berikut, yaitu : (a). cinta terhadap tanah air, (b).sadar berbangsa dan bernegara, (c). yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara dan (d). rela berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia serta (e). memiliki kemampuan awal bela negara. Kelima nilai dasar bela negara hendaknya dipandang sebagai keutamaankeutamaan hidup yang harus dihayati oleh para warga negara pada semua lapisan. Demikian pendidikan dipandang sebagai jalan atau sarana yang paling tepat untuk

menyadarkan para warga negara akan pentingnya nilai-nilai bela negara. Karena sebagai sarana penyadaran (konsientisasi), pendidikan menerangi cipta (akal), menggugah dan 4 menghangatkan rasa (emosi), dan memperteguh karsa (kehendak) para warga negara sehingga mereka memiliki rasa-memiliki (sense of belonging), rasa tanggung jawab (sense of responsibility) dan komitmen yang tinggi terhadap nasib bangsa dan negaranya. "Outcome" atau hasil yang diharapkan dari pendidikan kesadaran bela negara adalah warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya membela negara, dan yang mampu menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Proses dan hasil Pendidikan



Gambar – 1 : POLA PIKIR PENDIDIKAN BELA NEGARA

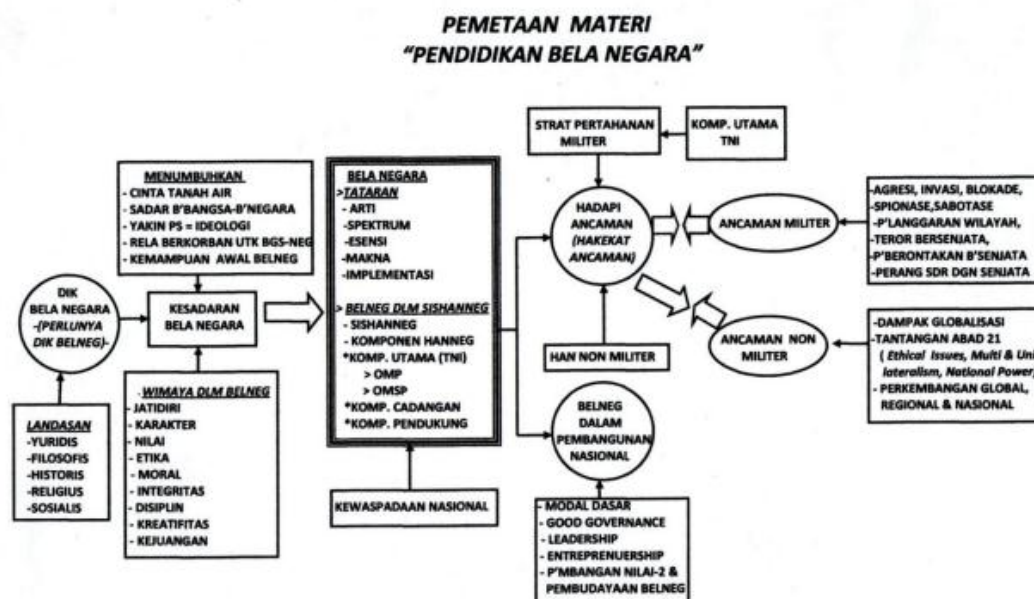
Bela Negara yang diharapkan tergambar pada Pola Pikir berikut :

Kementerian Pertahanan sebagai instansi yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau pembinaan kesadaran bela negara, mengklasifikasikan sasaran pembinaan dalam tiga lingkup yaitu : pendidikan, pekerjaan dan pemukiman. Tugas ini direalisasikan dalam kerja sama yang erat dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang khusus mengemban tugas kependidikan bagi seluruh warga negara. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai Program Pendidikan Kewarganegaraan di semua tingkat pendidikan mulai dari Sekolah Dasar sampai

Pendidikan Tinggi (pasal 37 Undang Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu kurikulum

wajib). Mengingat tugas utama dan pertama pendidikan kesadaran bela negara, yang diemban oleh Kementerian Pertahanan adalah menanamkan nilai-nilai keutamaan bela negara bagi warga negara dan merupakan pendidikan dasar bagi warga negara, maka pendidikan kesadaran bela negara sesungguhnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan kewarganegaraan (civic education). Adanya program pendidikan kesadaran bela negara dapat lebih menyadarkan warga negara, bahwa hal bela negara bukanlah semata-mata amanat konstitusi yang pelaksanaannya bersifat “perintah”, melainkan lebih merupakan amanat kodrat kemanusiaan. Kemanusiaan kita, kodrat kita sebagai homo sociale-lah yang menggerakkan kita sebagai warga negara untuk membela mati-matian negara, apapun konsekuensi yang harus kita hadapi. Kita adalah makhluk ciptaan yang selalu ingin hidup bersama orang lain dalam suatu jaringan “saling tergantung” orang lain dalam suatu ikatan sosial. Oleh karena itu tugas membela negara merupakan suatu kewajiban, bahkan suatu keharusan dan keniscayaan eksistensial warga negara, yang keluar dari eksistensi kita sebagai homo sociale. Mengapa ? Karena tugas membela negara dan/atau mempertahankan eksistensi negara, baik kedaulatannya, keutuhan wilayahnya, maupun keselamatan segenap rakyatnya, dari segala bentuk ancaman, fisik dan non-fisik, militer dan non-militer adalah tugas eksistensial yang bersifat tetap dari sebuah negara yang setelah terbentuk dan sepanjang sejarahnya. Cara pandang yang eksistensial ini memudahkan kita dalam seluruh proses pendidikan dan / atau pembentukan kesadaran bela negara dalam diri para warga negara. Dalam hal ini bela negara tidak hanya dipandang sebagai suatu tugas kenegaraan, melainkan juga sebagai suatu kehormatan dan kepercayaan yang diberikan oleh negara kepada setiap warga negara yang patut dibanggakan dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, penuh semangat rela berkorban demi pengabdian kepada ibu pertiwi, bangsa dan negara. Cara pandang “bela negara” sebagai amanat kemanusiaan ini berkaitan erat dengan hakikat negara sebagai persekutuan hidup bersama atau ikatan sosial manusia yang

terbesar, dimana individu warga negara dapat mewujudkan dimensi politis kehidupannya. Perlu kita ingat bahwa hanya didalam negara-lah, individu warga negara melangsungkan proses personisasi dirinya, proses penyempurnaan dirinya menjadi pribadi yang utuh sepanjang hidup. Dengan demikian negara sesungguhnya melekat pada diri manusia. Maka bila negara terancam eksistensi, individu warga negarapun rancam eksistensinya. Konsekuensi logisnya ialah bela negara adalah tugas kemanusiaan yang sangat fundamental dan eksistensial, yang tidak dapat ditawar-tawar. Menolak membela negara sama artinya menolak membela dan mempertahankan kehidupannya sendiri. Materi-materi yang diberikan dalam Pendidikan Bela Negara mulai landasanlandasan, menumbuhkan kesadaran bela negara, bela negara itu sendiri (yang meliputi tataran dan kedudukan bela negara dalam sistem pertahanan negara), ancaman yang harus dihadapi, dan hal-hal terkait dengan bela negara termasuk Widya Mwat Yasa yang merupakan jatidiri UPN



Gambar – 2 : PEMETAAN MATERI "PENDIDIKAN BELA NEGARA"

"Veteran" digambarkan pada pemetaan materi berikut

Landasan-landasan Pendidikan Bela Negara Pendidikan kesadaran bela negara memerlukan landasan-landasan yang jelas dan kokoh, agar pelaksanaannya tepat sasaran. Landasan-landasan tersebut meliputi landasan : yuridis, filosofis, historis,

sosiologis dan religius. 2.1. Landasan Yuridis Dalam penyelenggaraan bela negara dan pendidikan kesadaran bela negara diperlukan dasar-dasar hukum sebagai landasan yuridis sebagai pedoman dan titik tolak penyelenggaraannya. Dasar-dasar hukum tersebut adalah : 2.1.1. Bela Negara Ketentuan tentang hak dan kewajiban bela negara termuat dalam : a. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 : 7 "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara" b. Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 : "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan negara dan usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung" c. Pasal 68 Undang-Undang R.I. No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia : "Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara" d. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara : "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara " e. Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang R.I. No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara : warga negara juga dapat diwajibkan/secara sukarela menjadi anggota komponen cadangan dan anggota komponen pendukung, sebagai salah satu wujud bela negara. 2.1.2. Pendidikan Bela Negara. Ketentuan tentang pendidikan kesadaran bela negara termuat dalam : a. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara "Keikutsertaan warga negara dalam upaya belanegara sebagaimana yang dimaksud ayat (1), diselenggarakan melalui : 1). Pendidikan Kewarganegaraan. 2). Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. 3). Pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib. 4). Pengabdian sesuai dengan profesi. b. Pasal 3 Undang-Undang R.I. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional : "Tujuan pendidikan ialah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis dan bertanggung jawab. Sedang fungsi pendidikan ialah 8 mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencedaskan bangsa" 2.2. Landasan

filosofis. 2.2.1. Upaya Membangun Kesadaran Bela Negara. Diatas telah dikemukakan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan-tujuan luhur tersebut didasarkan pada Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa dan negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Pencapaian tujuantujuan tersebut di atas dilakukan melalui berbagai upaya pembangunan di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Upaya yang paling mendasar adalah menemukan dan menerapkan cara yang paling efektif untuk menyadarkan warga negara agar tergerak ikut serta dalam pembelaan negara. Dengan demikian pendidikan kesadaran bela negara berperan penting untuk membangkitkan kesadaran setiap dan seluruh warga negara akan hak dan kewajibannya dan semua potensi dirinya untuk membela bangsa dan negara. Selain melalui pendidikan, upaya membangun kesadaran bela negara dapat dilakukan dengan pemberian motivasi dalam berbagai bentuk dan cara. Motivasi mempunyai kekuatan tersendiri dalam mempengaruhi sikap dan pola pikir warga negara. Motivasi itu dapat juga muncul secara spontan dalam diri para warga negara, karena mereka menyaksikan langsung kemampuan negara dalam mengemban amanat rakyat dan mereka melihat dan merasakan langsung bahwa negara sungguh-sungguh bermanfaat bagi kehidupan mereka. Tanpa negara mereka tidak berdaya mengembangkan dirinya. Kemampuan dan manfaat negara itu tampak di dalam inisiatif negara negara menyediakan berbagai kebutuhan mereka, menyiapkan aneka fasilitas yang memudahkan mereka meraih kesejahteraan hdup, melindungi mereka dari berbagai ancaman, menciptakan iklim kebebasan, kesamaan, keadilan dan solidaritas. Menyaksikan semuanya itu, mereka termotivasi untuk bangkit membela negara, dan tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk tidak memenuhi hak dan kewajibannya membela negara, baik di masa damai maupun di masa perang. Disisi lain, motivasi untuk membela negara dapat muncul, karena para warga negara merasa terhormat jika mereka mengorbankan waktu,, tenaga dan pikirannya bagi kepentingan umum bangsa dan negara. Bagi para warga negara. pengorbanan demi 9 pengabdian kepada bangsa dan negara merupakan

suatu kehormatan dan kepercayaan. Dengan begitu, setiap warga negara akan berusaha menjadi orang yang dengan sukarela mau berkorban untuk bangsa dan negaranya. Namun demikian demi rasa keadilan dan kepastian bagi mereka dalam menunaikan hak dan kewajibannya membela negara, maka hal ihwal bela negara harus diatur dalam peraturan perundang-undangan. Singkat kata, proses motivasi akan berhasil jika setiap warga negara dan seluruh warga negara Indonesia selain mengenal dan memahami keunggulan dan kelebihan negara dan bangsa Indonesia, juga sekaligus mengenal dan memahami kemungkinan ancaman, gangguan hambatan dan hambatan terhadap eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Dalam rangka itu amat bermanfaat jika dikemukakan bahan-bahan untuk memotivasi sebagai berikut :

- a. Pengalaman sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.
- b. Posisi geografis Nusantara yang strategis.
- c. Keadaan penduduk (demografis).
- d. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah.
- e. Keanekaragaman budaya bangsa.
- f. Perkembangan dan kemajuan Iptek
- g. Kemungkinan timbulnya perang.

2.2.2. Pendidikan kesadaran bela negara dari aspek ilmu filsafat.

2.2.2.1. Aspek Ontologis.

Ontologis berbicara mengenai hal “ada” dan “yang mungkin ada” Yang ada dan yang mungkin ada itu adalah kenyataan. Dalam konteks pendidikan kesadaran bela negara, ontologi meneropongi negara dan nilai-nilai dasar bela negara. Negara diteropong sejauh negara menampakkan diri sebagai suatu kekuatan sosial, suatu persekutuan hidup yang riil, yang terbentuk karena konsensus bersama seluruh rakyat yang terhimpun di dalamnya, dan karena itu harus dibela. Nilai-nilai dasar bela negara, yaitu :

- 1) Cinta terhadap tanah air
- 2) Sadar berbangsa dan bernegara
- 3) Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara
- 4) Rela berkorban untuk bangsa dan negara.
- 5) Memiliki kemampuan awal bela negara.

Nilai-nilai tersebut diteropong dan merupakan keutamaan-keutamaan hidup warga negara yang menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. 10 Sejarah membuktikan, bahwa keberadaan nilai-nilai dasar bela negara tersebut sudah ada sejak bangsa Indonesia mengawali kehidupan berbangsa dan bernegara. Dasar itulah yang mendasari semangat pergerakan perjuangan memerdekakan bangsa ini dari cengkeraman penjajah, dan yang mendasari serta mendorong proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Dengan demikian nilai-nilai dasar bela negara memainkan peran yang sangat penting dalam kerangka

penguatan eksistensi bangsa dan negara guna menjaga, memelihara dan mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. 2.2.2.2. Aspek Epistemologis. Istilah “epistemologi” berasal dari bahasa Yunani “episteme” yang berarti mendudukan, menempatkan atau meletakkan sesuatu. Untuk menempatkan sesuatu yang ada itu membutuhkan metode. Jadi, epistemologi merupakan metode untuk menempatkannya menjadi suatu kenyataan yang lebih jelas dan terukur. 1) Secara substansial, pendidikan kesadaran bela negara adalah sebuah metode, yang dapat menggugah penghayatan peserta didik dan berbuah kesadaran, sehingga mereka mampu mengembangkan potensi dirinya, baik intelektual, emosional maupun perilaku, untuk berperan serta dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. 2) Penyampaian materi pendidikan kesadaran bela negara yang berbasis kompetensi menggunakan pendekatan konstruktivistik, yang berfokus pada peserta didik, dalam hal ini mahasiswa dengan metode antara lain : student active learning, problem based learning, contextual learning, inquiry, cooperative learning dan lain-lain. 2.2.2.3. Aspek Aksiologis. Aksiologi berbicara tentang manfaat dari “yang ada” itu untuk menghasilkan suatu tindakan. Dalam konteks pendidikan kesadaran bela negara, yang ada itu adalah negara dan nilai-nilai dasar bela negara yang diberikan melalui proses pendidikan kesadaran bela negara. Melalui berbagai substansi kajian diharapkan kedua hal itu mampu menumbuhkan kesadaran bela negara dalam diri mahasiswa dan tindakan konkret bela negara dalam rangka menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. 2.3. Landasan Historis. Masa lampau negeri ini tidak lepas dari catatan hitam penjajahan, baik oleh Belanda maupun Jepang. Kelahirannya sebagai suatu negara merdeka dan berdaulat, 11 dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia, berlangsung dalam suatu rangkaian bertahap yang berawal dari tahap perjuangan kemerdekaan dan memuncak pada momen proklamasi kemerdekaan sebagai tahapan yang mengantarkan bangsa Indonesia sampai pintu gerbang kemerdekaan. Itulah yang terumuskan dalam Alinea Kedua Pembukaan Undang-Undang 1945. Jadi kemerdekaan negeri ini bukanlah hadiah cumacuma dari penjajah, melainkan hasil perjuangan yang menelan korban yang tak terkirakan. Tahap perjuangan kemerdekaan berawal dari berbagai pergerakan yang berwawasan “kedaerahan”

seperti Boedi Oetomo (1908), Sarekat Islam (1911), Muhammadiyah (1912), Indische Party (1912), Indische Sosial Democratische Vereniging (1913), Trikoro Darmo (1915) sebagai embrio Jong Java (1918), Nahdhatoel Oelama (1926), dan Indonesia Moeda (1931). Semua pergerakan diatas beserta pergerakan-pergerakan lainnya dengan berbagai macam subkultur etnis, seperti Jong Ambon, Jong Sumatra, Jong Celebes dan sebagainya, melahirkan suatu pergerakan yang inklusif, yaitu pergerakan nasionalisme yang berjatidiri "Indonesianess" dengan mengaktualisasikan tekad politiknya dalam Soempah Pemoeda, 28 Oktober 1928. Para mahasiswa Indonesia yang belajar di negeri Belanda mendeklarasikan Manifesto Politik pada tahun 1925. Dari keanekaragaman subkultur di atas terkristalisasi suatu core culture (budaya inti) yang kemudian menjadi basis eksistensi negara-bangsa (nation state) Indonesia, yaitu nasionalisme. Jadi, pada tahapan penjajahan, semua suku bangsa dan subkultur yang berada dibawah tekanan penjajahan Belanda, oleh kesadaran akan keterjajahannya, mulai bangkit dan menegaskan diri sebagai satu bangsa (tunggal), yaitu bangsa Indonesia. Itulah sebabnya, nasionalisme jaman penjajahan ini dapat disebut sebagai nasionalisme anti-kolonialisme, anti-imperialisme dan anti-diskriminasi. Ciri nasionalisme ini terungkap jelas dalam Sumpah Pemuda :

- ☞ Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.
- ☞ Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia.
- ☞ Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Dengan demikian, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dapat disebut sebagai awal tumbuhnya kesadaran berbangsa (nasionalisme) Indonesia yang berfungsi sebagai penggerak jiwa manusia diseantero Nusantara untuk membentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat :Indonesia. Fungsi itu berjalan dan mewujudkan dalam peristiwa 12 proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan pengesahan Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan semangat merdeka dan berdaulat seluruh bangsa dibawah kepemimpinan para pendiri negara, yang kemudian secara formal dirumuskan dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dewasa ini semangat yang sama kiranya perlu terus diaktualisasikan dan diwujudkan dalam sikap dan perilaku warga negara yang rela berkorban membela negara demi menjamin

kelangsungan dan pengembangan perikehidupan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak awal kemerdekaan hingga era reformasi sekarang ini, peristiwa sejarah sebagai wujud hak dan kewajiban bela negara itu dapat dikelompokkan berdasarkan periodisasi sebagai berikut : a) Periode 1945 – 1949, yakni perang kemerdekaan menghadapi Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Pada periode ini wujud hak dan kewajiban warga negara dalam pembelaan negara lebih terlihat dalam keikutsertaan dalam perang kemerdekaan, baik bersenjata maupun tidak bersenjata. Hal ini selaras dengan pidato Jendral Soedirman pada tanggal 12 Nopember 1945 menyatakan : “Bahwa Negara Indonesia tidak cukup dipertahankan oleh tentara saja, maka perlu sekali mengadakan kerja sama yang erat-eratnya dengan golongan serta badan-badan diluar tentara”. b) Periode 1950 – 1965. Pada periode ini bangsa Indonesia mengalami berbagai bentuk gangguan keamanan dalam negara. Periode ini juga diwarnai dengan perjuangan Trikora merebut kembali Irian barat dan perjuangan Dwikora. Oleh sebab kondisis demikian ini, perwujudan hak dan kewajiban warga negara dalam pembelaan negara sudah mengarah pada perwujudan keindonesiaan yang dicita-citakan, namun mengingat kondisi dan situasi, warna perjuangan melalui kegiatan peratahanan dan keamanan, baik bersenjata maupun tidak bersenjata, lebih mengemuka. Pada periode ini juga dilaksanakan Konferensi Asia Afrika (1955), Pemilu untuk Anggota DPR/Konstituante (1955), Pembentukan Gerakan Non Blok (GNB), keluarnya Indonesia sebagai anggota PBB, berlakunya Nasakom / demokrasi terpimpin, makin kuatnya PKI, dibubarkannya partai-partai yang bertentangan dengan PKI, dibentuknya Front Nasional yang lebih menentukan politik / kebijakan pemerintah dan terjadinya peristiwa G.30.S / PKI. c) Periode 1966 – 1998 atau periode Orde Baru. Bangsa Indonesia memasuki periode pembangunan dengan tantangan yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian. Pada periode ini perwujudan hak dan kewajibanwarga negara dalam pembelaan 13 negara tampak dalam kegiatan terpadu keamanan dan pertahanan, yang terfokus pada stabilitas nasional. d) Periode reformasi sejak tahun 1998, tantangan kebangsaan Indonesia semakin maya karena pengaruh arus globalisasi yang menuntut transparansi dan kehidupan bangsa yang lebih demokratis. Pada periode ini hakikat dan hak dan kewajiban bela negara terarahkan kepada peningkatan ketahanan nasional, sama

seperti periode Orde Baru, dengan menitikberatkan demokratisasi dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Dari rangkaian peristiwa sejarah upaya bela negara sebagaimana diuraikan diatas, tampak dinamika kehidupan bangsa untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Seluruh warga negara menjalankan hak dan kewajibannya dalam wujud yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi dan berkembang pada zamannya. Pada periode perang fisik, para warga negara menjalankan hak dan kewajibannya dengan mengangkat senjata, sedangkan pada masa damai sekarang ini, perwujudan cita-cita dan tujuan nasional dilakukan melalui pembangunan nasional, dimana para warga negara memperlihatkan komitmen kebangsaannya melalui profesionalismenya di bidang masing-masing.

2.4. Landasan Sosiologis

Landasan Sosiologis bagi pendidikan kesadaran bela negara bertumpu pada negara sebagai kesatuan atau ikatan sosial terbesar yang memiliki kekuasaan tertinggi atas bentuk-bentuk masyarakat lainnya, dan manusia (rakyat, warga negara) sebagai makhluk sosial yang membentuk negara. Sebagaimana kita tahu, oleh kesosialannya, manusia selalu mau atau tergerak untuk hidup bersama orang lain. Kecenderungan ini menghasilkan berbagai tangkatan kesatuan atau ikatan sosial, mulai dari keluarga sebagai unit terkecil masyarakat, lalu meluas kepada masyarakat, hingga bangsa dan negara. Di dalam ketentuan-ketentuan sosial itu, manusia individual berinteraksi dengan sesamanya di dalam lingkungan sekitar tempat ia tinggal dan beraktivitas. Dalam dunia modern dewasa ini, ia tidak saja berinteraksi dengan lingkungan terdekatnya, tetapi juga dengan lingkungan seluas dunia melalui segala sarana teknologi modern. Ia di satu pihak (dapat) mempengaruhi sesama dan masyarakat dengan pola pikir dan seluruh sikap hidupnya, tetapi di pihak lain ia juga dipengaruhi oleh masyarakat dengan paham-paham, nilai-nilai, dan norma-norma yang dianut masyarakat, bangsa dan negara. Lingkungan tempat ia tinggal dan beraktivitas menetapkan apa yang baik yang boleh dilakukan dan apa yang buruk yang tidak boleh dilakukan. Ia akan diterima oleh lingkungan sosialnya sejauh ia mengakui dan menghayati paham, nilai dan norma yang dianut masyarakat, serta turut serta dalam berbagai tugas social demi terciptanya kebaikan umum. Sebaliknya ia akan ditolak jika ia hidup dan bertindak laku tidak selaras paham, nilai, dan norma yang dianut masyarakat, dan dengan begitu tidak memberikan sumbangan apapun bagi kebaikan umum

masyarakat. Di dalam kesatuan-kesatuan social itu, manusia individual menjalani proses personisasi, proses penyempurnaan diri sebagai pribadi. Di sana pula ia mewujudkan dimensi politis kehidupannya dengan melakoni peran-peran sosial demi kebaikan umum masyarakat. Dengan peran-peran sosial itu serta seluruh kehidupannya, ia membaktikan diri bagi kebaikan umum seluruh masyarakat, bangsa dan negara. Dalam konteks negara sebagai kesatuan atau ikatan sosial terbesar yang dibentuk oleh rakyat atas dasar konsensus bersama, individu warga negara bertumbuh dalam kesempurnaan dirinya sebagai manusia. Negara, sesuai tugas pokoknya, menyediakan berbagai fasilitas yang memungkinkan warga negara mengembangkan dirinya dan mengusahakan kesejahteraan. Maka pada gilirannya, warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu disamping hak-haknya, terhadap negara. Salah satu hak dan kewajiban dasar warga negara adalah hak dan kewajiban membela negara.

2.5. Landasan Religius.

Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya bukan negara agama dan juga bukan negara sekular. Namun hampir seluruh rakyatnya menganut salah satu dari agama-agama besar dunia, dan percaya akan suatu Wujud Tertinggi yang Esa. Oleh karena itu, sejak awal para pendirinya mendasarkan bangunan bangsa dan negara ini di atas landasan iman-kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dijiwai semangat kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan dan kesatuan bangsa, dan kerakyatan untuk menciptakan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Keberhasilan perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaannya diyakini terutama sebagai rahmat Allah. Hal itu tampak jelas di dalam rumusan Alinea Ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 : "Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya". Oleh sebab itu, nasib bangsa dan negara ini ke depannya, tidak bisa bertumpu semata-mata pada kekuatan duniawi dan manusiawi seluruh rakyatnya, tetapi lebih-lebih harus bertumpu pertama-tama pada iman-kepercayaan yang kukuh akan penyertaan Allah yang Maha Kuasa.

15 Pendidikan kesadaran bela negara disamping mendasarkan diri pada kelima landasan diatas, harus pula dilandaskan pada kekuatan iman-kepercayaan tiap-tiap dan seluruh warga negara dalam agama masing-masing. Kecuali itu, dalam konteks pembelaan negara, adalah

suatau kesalahan besar apabila kemerdekaan bangsa dan negara yang sudah dikaruniakan oleh Allah yang Maha Kuasa, dibiarkan diporakporandakan oleh berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, bukan terus dibela dan dipertahankan. Dalam iman-kepercayaan yang kukuh akan penyertaan Allah dalam seluruh perjuangan anak-anak bangsa ini, sambil terus berusaha melepaskan diri dari segala praktik-praktik penyelenggaraan negara yang tidak selaras dengan ajaran Tuhan (KKN, perilaku diskriminasi, mental feodalisme dll), kiranya seluruh anasir negatif : ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, diatas dapat teratasi dengan gilanggemilang.

3. Maksud dan tujuan Pendidikan Bela Negara

3.1. Maksud Pendidikan Bela Negara

Pendidikan Bela Negara dimaksudkan sebagai cara untuk memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara dalam upaya pembelaan negara, dengan menumbuhkan kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara, serta memberikan kemampuan awal bela negara, baik psikis maupun fisik.

3.2. Tujuan Pendidikan Bela Negara

Pendidikan Bela Negara ertujuan :

- a) Agar peserta didik/mahasiswa mengerti dan mampu menjelaskan pengertian, spektrum, esensi dan makna bela negara serta nilai-nilai bela negara yakni : cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan benegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara serta memiliki kemampuan awal bela negara.
- b) Agar peserta didik/mahasiswa mampu memahami dan menghayati nilai-nilai bela negara.
- c) Agar peserta didik/mahasiswa mampu bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai bela negara serta mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kesadaran Bela negara.

Kesadaran tidak dapat secara tegas didefinisikan. Dalam arti luas "kesadaran" adalah kesanggupan kodrati manusia yang membuat dia mengakui dirinya sebagai keadaannya sendiri. Kesadaran menurut Schneider dan Velmans (2007), adalah : "Apa pun yang kita sadari pada saat tertentu merupakan bagian dari kesadaran kita, membuat pengalaman sadar merupakan hal yang paling umum dikenal dan paling misterius dalam aspek kehidupan kita" Kesadaran meliputi seluruh indra kita, akal

pikiran kita, perasaan kita, dan kehendak kita, singkatnya keseluruhan kehidupan kita. Bandingkanlah misalnya keadaan hidupsadar dengan keadaan tidak sadar dari seseorang yang jatuh pingsan, atau dari seseorang yang sedang tidur pulas. Kita disebut sebagai "orang sadar" manakala kita menyadari segala hal yang terjadi atas kita dalam tahap tertentu. Istilah "sadar diri" digunakan untuk menekankan bentuk pengetahuan yang lebih reflektif, dalam mana kita secara formal mengakui keadaan kita sebagai keadaan milik kita sendiri. Pada dasarnya kesadaran merupakan kesanggupan alamiah manusia untuk mengenal diri sendiri, karena manusia pada hakikatnya makhluk yang sadar diri, makhluk yang bisa mengambil jarak dari dirinya sendiri untuk merenungkan dirinya sendiri. Kesadaran berkaitan erat dengan hati nurani. Hati nurani disebut juga kesadaran moral, kesadaran etis, kesadaran manusia terhadap hal yang baik dan buruk. Dari hal tersebut, kita bertanya : apakah membela negara itu merupakan hal yang baik atau buruk? Orang yang memiliki hati nurani yang bening, akan secara jujur mengatakan jika apa yang kita lakukan itu buruk, pasti orang lain juga mengatakan buruk, dan sebaliknya apa yang kita lakukan itu baik, orang lain pasti juga akan mengatakan baik. Tidak mungkin kita mengatakan baik, padahal orang lain mengatakan buruk, dan sebaliknya apa yang kita sangka buruk, ternyata baik bagi orang lain. Kalau terjadi pertentangan tentang apa yang kita lakukan maka perbuatan itu perlu ditinjau kembali. Disinilah pentingnya setiap orang menjaga kesadarannya melalui refleksi yang mendalam ketika ia hendak mengambil keputusan dan melakukan suatu tindakan. Terlebih lagi apabila keputusan dan tindakan itu berkaitan dengan pembelaan terhadap kepentingan bangsa dan negara. Pembelaan negara merupakan hak dan sekaligus kewajiban dasar warga negara. Atas dasar itu warga negara dengan asumsi ini, warga negara wajib membela negara apabila kemerdekaan bangsa dan negara serta kedaulatan negara terancam bahaya. Hal ini sesuai dengan pandangan bangsa Indonesia tentang perang dan damai yakni "kita cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan". Dengan demikian membela negara dalam rangka mempertahankan kemerdekaan tidak bertentangan dengan hati nurani dan kesadaran kita sebagai warga negara dalam bela negara sebagaimana telah diperintahkan negara melalui peraturan perundang-undangan yang ada sekarang, tidak bertentangan dengan etika politik atau prinsip-prinsip moral dasar negara modern. Namun demikian kesadaran

bela negara bukanlah sesuatu yang tumbuh dengan sendirinya dalam diri para warga negara. Diperlukan upaya-upaya sadar dan terencana secara matang untuk menanamkan dalam diri para warga landasan dan nilai-nilai bela negara sebagai berikut : a. Cinta terhadap tanah air. b. Sadar berbangsa dan bernegara. c. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. 19 d. Rela berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia. b. Memiliki kemampuan awal bela negara. 2. Nilai-nilai Bela Negara. 2.1. Cinta terhadap Tanah Air. Cinta tanah air adalah perasaan cinta terhadap bangsa dan negara. Karena cinta terhadap tanah air maka dengan sepenuh hati rela berkorban untuk membela bangsa dan negara dari setiap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan. Pada hakikatnya cinta tanah air adalah kebanggaan menjadi bagian dari tanah air dan bangsa yang pada ujungnya ingin berbuat sesuatu untuk mengharumkan nama tanah air dan bangsa. Untuk memahami pentingnya mewujudkan cinta tanah air, dapat kita wujudkan setiap hari dengan bagaimana sikap kita dalam menjalani hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan pantang menyerah, peduli dan saling membantu antara umat. Itu merupakan cerminan cinta tanah air. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Negara dan bangsa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita., yang akan selalu kita bawa sampai akhir hayat kita. Negara dan bangsa tidak akan terlepas dari kehidupan kita. Cinta tanah air dapat pula diartikan rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghormati dan loyalitas yang dimiliki setiap individu pada negara dimana dia tinggal. Kesemuanya itu tercermin pada perilaku membela, menjaga dan melindungi tanah airnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya, mencintai adat dan budaya yang ada di negaranya serta melestarikan alam dan lingkungannya. Beberapa sikap dan perilaku yang mencerminkan bahwa kita mencintai tanah air, antara lain : a. Bangga sebagai orang Indonesia, b. Memakai produk dalam negeri, c. Mentaati semua peraturan-perundangan, d. Taat membayar pajak e. Dengan ikhlas mengikuti upacara bendera. f. Menjaga kelestarian lingkungan, g. Saling hormat-menghormati sesama warga negara, dan masih banyak lagi sikap dan perilaku yang menunjukkan rasa cinta tanah air. 2.2. Sadar berbangsa dan bernegara. 20 Bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat-istiadat, budaya, sejarah dan pemerintahan sendiri. Sedangkan berbangsa adalah sekelompok manusia

tersebut memiliki landasan etika, bermoral dan berakhlak mulia dalam bersikap mewujudkan makna social dan adil. Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Sedangkan bernegara adalah sikap dari kelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses dalam satu wilayah atau satu negara. Kesadaran dapat diartikan sebagai sikap perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri dengan dilandasi suasana hati yang ikhlas/rela tanpa tekanan dari luar untuk bertindak yang pada umumnya dalam upaya mewujudkan kebaikan yang berguna untuk diri sendiri dan lingkungannya. Berbangsa dan bernegara merupakan suatu konsep atau istilah yang seorang individu terikat dan atau menjadi satu bagian dari suatu bangsa (nation) dan negara (state). Jadi kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan/kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Bagaimana kesadaran berbangsa dan bernegara rakyat Indonesia ? Apakah masih kuat atau cenderung lemah? Bila melemah apa gejalanya dan penyebabnya ? Gejala melemahnya kesadaran berbangsa dan bernegara antara lain dapat kita lihat dari perilaku individu sebagai rakyat maupun pejabat yang masih menunjukkan tindakan-tindakan yang melanggar kaidah hukum, seperti mafia hukum, pencemaran lingkungan, tindakan kriminalitas, pembalakan liar, lebih mementingkan diri dan kelompok, korupsi, bersikap kedaerahan yang berlebihan, anarkis, penggunaan narkoba, kurang menghargai karya bangsa sendiri, mendewakan produk bangsa lain dan masih banyak lagi perilaku yang memperlemah kesadaran berbangsa dan bernegara. Merosotnya kesadaran berbangsa dan bernegara secara umum diakibatkan oleh empat penyebab yang sekaligus merupakan tantangan kedepan, yaitu : 1) Globalisasi yang didukung dengan perkembangan teknologi informasi dan transportasi, membuat antara bangsa dan negara seolah-olah tidak ada batas lagi (borderless), bahkan seolah-olah kita menjadi warga dunia sehingga identitas sebagai 21 bangsa mandiri dan memiliki

karakteristik tersendiri menjadi lebur dengan bangsa lain yang juga hilang identitasnya. Akibatnya tumbuh dan muncul budaya dunia/global. Identitas sebagai bangsa semakin tidak jelas. Kedaulatan semakin menjadi mitos. Ketergantungan antar negara semakin tinggi. 2) Kepinginan perasaan kedaerahan semakin menebal. Otonomi daerah telah merangsang nafsu putra-putri daerah untuk menguasai tempat basah. Posisi politis strategis dimanfaatkan untuk memperkaya diri dan keluarga serta membangun "kerajaan" atau "trah" atau "dinasti" baru. Mereka kehilangan wawasan dan solidaritas bangsa dan tanggung jawab untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. 3) Budaya konsumisme dan hedonistik memunculkan gaya hidup (live style) mewah. Konsumisme adalah sikap ketagihan para konsumen terhadap produk kapitalis. Kapitalis tidak hanya memproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tapi juga menciptakan kebutuhan-kebutuhan baru untuk kepuasan masyarakat. Dengan gaya hidup mewah sudah tidak memperhatikan lagi azas manfaat tapi cenderung mengikuti trend gaya hidup konsumtif hedonis. Dampaknya kurang menghargai produk lokal yang dipandang kurang memberikan prestise gaya hidup modern yang diartikan salah. 4) Munculnya ideologi-ideologi totaliter yang meng-klaim memiliki kebenaran yang mutlak serta menuntut ketaatan tanpa reserve. Ideologi komunisme dan naziisme merupakan ideologi totaliter yang dikelompokkan sebagai ideologi ekstrim kiri. Sedangkan ideologi religius fundamentalis dikelompokkan sebagai ideologi totaliter ekstrim kanan. Keduanya dapat mengancam kesadaran terhadap berbangsa dan bernegara. Ada kesan bahwa dengan harga mati Pancasila sebagai ideologi yang tidak perlu dipermasalahkan lagi, seolah-olah Pancasila tidak perlu dipermasalahkan lagi, toh masyarakat sudah menerima. Kita dan pemerintah lupa bahwa generasi selalu berganti. Oleh karena itu harus terus-menerus diberikan pendidikan politik bagi generasi baru demi kelanggengan dan kesinambungan NKRI. Disamping gejala dan penyebab mudarnya rasa kesadaran berbangsa dan bernegara, ada beberapa faktor penghambat yaitu : a. Rasa malu berbangsa dan bernegara Indonesia. b. Ketidaktahuan akan nilai-nilai positif / kekayaan NKRI. c. Menurunnya tingkat keamanan Indonesia. d. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah. e. Ketidak-sederhanaan kehidupan para pemimpin. f. Ketidak-tegasan hukum. 22 g. Munculnya rasa ingin menonjolkan kelompok atau golongan masing-masing. h. Merosotnya nilai toleransi

dan saling menghargai. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan adanya faktor-faktor pendukung yang harus terus-menerus diupayakan, untuk terciptanya rasa kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu :

- a) Tingkat keamanan dan keteladanan seorang pejabat/pemimpin. Apabila pejabat/pemimpin amanah dalam menjalankan serta memberikan teladan yang baik, tentu semua orang akan berlaku jujur dalam menjalankan tugas dan masyarakat akan mengikuti hal-hal yang baik tersebut.
- b) Pemerataan kesejahteraan. Dengan adanya pemerataan kesejahteraan maka setiap warga akan merasakan adanya aturan yang sama dan perlakuan yang sama sebagai warga negara. (Ingat salah satu tujuan nasional yang diamanatkan dalam alinea ke empat Pembukaan UUD 1945 :memajukan kesejahteraan umum.....)
- c) Keadilan dalam memberikan hak dan kewajiban sesama warga negara. Beberapa hak dan kewajiban setiap warga negara telah diamanatkan dalam konstitusi kita (UUD 1945). Sebaliknya kewajiban pemerintah belum sepenuhnya menyentuh atau menjawab apa yang menjadi hak warga negara. Misalnya, pasal 31 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, namun kita masih melihat masih banyak warga negara yang belum mendapatkan pendidikan yang layak.
- d) Kepercayaan kepada wakil rakyat dan pemerintah. Dengan memberikan kepercayaan kepada pemerintah akan tumbuh rasa bangga bahwasanya mempunyai negara yang dapat dibanggakan. Serta wakil rakyat –pun akan senang hati menjalankan amanah yang diberikan warga negara/rakyat.
- e) Tegasnya peraturan dan perundangan. Republik Indonesia adalah negara hukum dengan tiga prinsip dasar yang harus dipatuhi segenap warga dan pejabat. (supremasi hukum di atas segala-galanya, kesetaraan di depan hukum, penegakkan hukum tanpa melanggar hukum). Dengan hukum dan aturan yang tegas akan menumbuhkan rasa percaya dan bangga terhadap negara.
- f) Rasa memiliki, bangga serta menyadari berbangsa dan bernegara yang satu Indonesia. (ingat Sumpah Pemuda)
- g) Mengetahui lebih banyak hal-hal yang positif serta kekayaan Indonesia, jangan selalu negative thinking terhadap bangsa dan negara Indonesia.

2.3. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi berasal dari bahasa Inggris idea yang berarti gagasan, pemikiran pengertian, dan logy yang berarti ilmu, pengetahuan. Dalam bahasa Yunani idean yang berarti mengetahui, melihat dengan budi, dan logos yang berarti ajaran atau ilmu. Jadi

ideologi mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide (sciences of ideas) atau pengertian-pengertian dasar. Pengertian ideologi secara umum adalah suatu kumpulan gagasan, ide, keyakinan serta kepercayaan yang bersifat sistematis dan berorientasi pada tingkah laku dalam berbagai bidang kehidupan, diantaranya kehidupan politik, hukum, pertahanan keamanan, ekonomi, sosial-budaya serta bidang keagamaan / kepercayaan. Jadi Pancasila sebagai ideologi negara, adalah ideologi yang bersumber dari seluruh nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai Pancasila menjadi sumber inspirasi dan cita-cita hidup bangsa Indonesia. Pancasila menjadi pedoman hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara adalah nilai-nilai Pancasila merupakan suatu dasar nilai untuk mengatur pemerintahan negara. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara merupakan sumber semangat bagi para penyelenggara negara dan para pelaksana pemerintahan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya agar tetap diliputi dan diarahkan pada azas kerokhaniaan negara seiring dengan perkembangan jaman dan dinamika masyarakat. Pancasila sebagai konsep, gagasan atau himpunan dan ide-ide sesungguhnya telah teruji, baik dalam kajian ilmiah apalagi dalam menghadapi ujian dan ancaman yang secara fisik ingin merubah Pancasila sebagai ideologi negara. Setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, telah terjadi beberapa peristiwa yang sadar atau tidak ingin merubah ideologi Pancasila. Antara lain pemberontakan PKI Madiun pada 1948, pemberontakan DI/TII, pemberontakan PRRI/Permesta, pemberontakan G.30.S/PKI. Namun kesemuanya itu dapat ditumpas oleh bangsa Indonesia yang tetap mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara. Kita tidak berlebihan bila mengatakan bahwa Pancasila terbukti sakti dalam menghadapi berbagai ujian dan gangguan. Pancasila sejak lama telah terbukti sakti, sakti dalam arti bukan mistik atau klenik, namun sakti dalam arti ketika diserang dari berbagai penjuru, dari berbagai paham selalu dapat mempertahankan keberadaannya sebagai ideologi negara, sebagai dasar negara. 24 Dalam era global saat ini yang ditunjang dengan kemajuan teknologi utamanya Teknologi Informasi dan Transportasi, telah mengubah tata cara kehidupan berbangsa dan bernegara, antar bangsa dan negara seolah-olah sudah tidak ada batasnya (borderless). Kehidupan masyarakat semakin demokratis, diwarnai dengan aktifitas untuk

menanamkan nilai-nilai diluar ideologi Pancasila. Bahkan ada upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai ideologi negara. Disisi lain masyarakat kita semakin mudah terprovokasi, mudah marah, siap menang namun tidak siap kalah, serta memaksakan kehendak yang berujung pada timbulnya konflik horizontal. Kondisi yang memprihatinkan ini adalah indikasi bahwa makin tergerusnya nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu nilai-nilai Pancasila yang sudah ada jauh sebelum negeri ini berdiri harus kita hidupkan kembali, harus kita revitalisasi. Keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai salah satu nilai dari kesadaran bela negara harus ditanamkan kepada setiap warga negara. Pemahaman Pancasila sebagai ideologi negara serta bukti nyata akan kesaktian Pancasila dalam perjalanan sejarah bangsa harus tertanam dalam sanubari setiap warga negara yang memiliki hak dan kewajiban dalam upaya bela negara.

2.4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia. Patriotisme adalah sikap yang berani, pantang menyerah dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Patriotisme berasal kata patriot dan isme yang berarti sifat kepahlawanan atau jiwa pahlawan (dalam bahasa Inggris patriotism atau heroism). Pengorbanan ini dapat berupa harta benda atau jiwa raga. Patriotisme pada dasarnya berkaitan erat dengan nasionalisme. Nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Kesadaran keanggotaan suatu bangsa yang secara potensial maupun aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan dan mengabdikan jati diri, integritas, kemakmuran dan kekuatan suatu bangsa (Saptono, 2009). Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa keduanya sama-sama berorientasi pada kecintaan pada bangsa dan negara. Karena itu patriotisme sering disinonimkan dengan nasionalisme. Sejarah perjuangan Indonesia telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia telah banyak berkorban untuk mencapai kemerdekaan. Selama 350 tahun lebih bangsa ini hidup dalam kesengsaraan dibawah kekuasaan penjajah. Pengalaman pahit selama itu dijadikan sebagai motivasi atau penggerak untuk meraih kemerdekaan sehingga benarbenar terbebas dari berbagai penderitaan. Peristiwa 10 Nopember 1945 merupakan bukti nyata perjuangan bangsa Indonesia yang memiliki semangat patriotik. Mereka tetap mempertahankan kemerdekaan dan tidak ingin bangsa lain kembali menjajah tanah air 25 Indonesia. Tidak sedikit yang gugur dalam peristiwa heroik tersebut. Jiwa raga dan harta mereka korbakan. Kecintaan terhadap tanah air, bangsa dan negara

merupakan dorongan utama para pejuang saat itu. Perjuangan serta pengorbanan para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan dilandasi kecintaan mereka terhadap tanah air, bangsa dan negara. Saat ini perjuangan dan pengorbanan secara fisik melawan penjajah sudah tidak ada lagi, Tetapi patriotisme jiwa kepahlawanan dengan berjuang serta berkorban demi bangsa dan negara dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 perlu ditingkatkan lagi. Secara konstitusional perjuangan dan pengorbanan ini telah diamanatkan dalam pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi "Setiap warga negara berhak dan wajib dalam upaya bela negara". Pengorbanan ini demi tetap tegaknya NKRI, kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan seluruh rakyat dari segala bentuk ancaman baik ancaman fisik maupun non-fisik. Rela berkorban demi bangsa dan negara yaitu dengan rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan harta-benda untuk kepentingan umum. Atau dengan pengertian lain adalah pengabdian tanpa pamrih yang diberikan oleh warga negara terhadap tanah tumpah darah dengan penuh kesadaran, keikhlasan dan tanggung jawab untuk mempertahankan kelangsungan kejayaan bangsa dan negara Republik Indonesia. Ditengah arus globalisasi saat ini, dimana sifat dan perilaku individu yang kurang peduli dengan kehidupan sekitarnya semakin menonjol, muncul pertanyaan : masih adakah warga negara kita yang dengan ikhlas dan rela berkorban demi bangsa dan negara dari warga negara kita ? Ternyata masih banyak diantara warga negara kita yang dengan sukarela dan bergotong royong mengabdikan dirinya untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Sebagai misal pelaksanaan siskamling/ronda malam yang dilaksanakan demi keamanan lingkungan perumahan. Melaksanakan siskamling adalah merupakan wujud kerelaan berkorban anggota masyarakat untuk kepentingan dan keamanan bersama. Beberapa penerima Anugerah Kalpataru dalam bidang penyelamatan lingkungan adalah bukti bahwa masih ada warga negara yang dengan sukarela berkorban untuk kepentingan bersama. (membuat bendungan, membuat jalan tembus, menyelamatkan hutan mangrove dan lain sebagainya). Beberapa kegiatan di lingkungan pendidikan tinggi juga menunjukkan kerelaan berkorban untuk masyarakat, bangsa dan negara. Antara lain, program KKN, dibalik adanya nilai akademik bagi mahasiswa, mereka juga menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diterima di bangku kuliah untuk kemaslahatan kehidupan masyarakat.

Penciptaan peralatan Teknologi Tepat Guna dan disumbangkan kepada masyarakat akan dapat meningkatkan taraf kehidupan 26 masyarakat terutama yang didaerah tertinggal. Sekelompok anak muda / mahasiswa dengan sukarela membuat rumah singgah dan memberikan pendidikan non-formal kepada anak-anak jalanan (dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai salah satu tujuan nasional). Para sukarelawan yang terjun dalam menanggulangi bencana alam juga bukti masih adanya kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara. Dan masih banyak lagi kegiatan yang menunjukkan adanya kerelaan berkorban demi bangsa dan negara. Namun disisi lain, masih banyak warga negara yang tidak perduli dengan nasib bangsa dan negaranya. Mereka telah terbawa arus glogalisasi yang membuatnya terlena dengan paham-paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu pemahaman kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara yang merupakan salah satu nilai-nilai bela negara harus ditanamkan dan disadarkan kepada segenap warga negara melalui pendidikan formal dan non formal serta keteladanan dari berbagai pihak termasuk para pemimpin bangsa.

2.5 Memiliki kemampuan awal bela negara. Nilai bela negara terakhir adalah memiliki kemampuan awal bela negara secara psikis maupun fisik. Secara psikis, yaitu memiliki kecerdasan emosional, spiritual dan intelegensia (EQ, SQ, IQ), senantiasa memelihara jiwa dan raganya serta memiliki sifatsifat disiplin, ulet, kerja keras dan tahan uji. Dan tidak kalah pentingnya secara psikis adalah mentaati semua peraturan perundangan. Sedangkan secara fisik yaitu memiliki kondisi kesehatan yang prima, ketrampilan jasmani untuk mendukung kemampuan awal bela negara secara psikis dengan gemar berolahraga dan senantiasa menjaga kesehatan. Potensi atau kemampuan awal bela negara secara psikis maupun fisik dapat dikembangkan dan ditingkatkan. Sebagai contoh kecerdasan emosional (EQ) dilatih atau dibiasakan dengan pengendalian diri, bersikap sopan santun, rendah hati. Kecerdasan spiritual (SQ) ditingkatkan dengan senantiasa rajin melaksanakan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing. Kecerdasan intelegensia (IQ) dikembangkan dengan mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan. Kemampuan awal bela negara secara fisik dapat dikembangkan dengan menjaga kesehatan agar tetap prima dengan jalan menjaga asupan makanan yang bergizi (empat sehat lima sempurna), mempertahankan kesamaptaan jasmani dengan olahraga

1. Bela Negara sebagai Modal Dasar Pembangunan Nasional Pada hakekatnya, pembangunan nasional merupakan wujud perjuangan secara terus menerus dari setiap warga negaranya berdasarkan profesinya dengan prestasi terbaik untuk mewujudkan kesejahteraan dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya. Kesejahteraan lahir-batin, jasmani-rohani, materiil-spirituil menjadi kebutuhan hidup dan kehidupan setiap anggota masyarakat maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sisi lain, setiap individu, setiap kelompok masyarakat, bahkan setiap negara di dunia mempunyai kepentingan yang memungkinkan terjadinya perebutan atau persaingan yang dapat menyebabkan terjadinya konflik kepentingan, dan bahkan memungkinkan terjadinya pelanggaran norma, yang selanjutnya bisa menimbulkan pertikaian dan bahkan peperangan. Disinilah pentingnya membangun visi setiap warga negara dan visi bersama dalam membangun masa depan bangsanya. Bagi bangsa Indonesia maupun bangsa-bangsa lain di dunia, dalam rangka pembangunan nasionalnya, setidaknya ada beberapa isu penting yang menjadi bahan pertimbangan yaitu isu tentang hak azasi manusia (HAM), supremasi hukum, lingkungan hidup, demokratisasi, dan globalisasi ekonomi. Ini menunjukkan bahwa isu-isu tersebut merupakan persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan negara-negara saat ini. Bagi bangsa Indonesia, diberlakukannya UU Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang lebih mengutamakan azas desentralisasi kekuasaan dan kewenangan kepada daerah, juga merupakan isu yang diharapkan dapat mendorong percepatan bagi proses pembangunan nasional melalui peningkatan pemberdayaan masyarakat. Globalisasi merupakan suatu pemikiran, ide, sistem, pandangan hidup yang menjadi universal, menjagad atau mengglobal. Berlangsung sejak akhir dekade abad 20, semakin menuntut ketahanan dan daya saing yang tinggi utamanya dalam kehidupan perekonomian bangsa-bangsa. Globalisasi merupakan tuntutan sosialisasi dalam kehidupan manusia, yang kemudian sangat besar pengaruhnya dalam memberikan corak dan arah pembangunan setiap negara. Globalisasi dapat digambarkan sebagai proses integrasi antar negara, yang nampak dari proses saling ketergantungan politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya yang berkembang diantara negara-

negara di dunia. Kecenderungan globalisasi saat ini ditandai dengan semakin cepatnya perubahan lingkungan eksternal maupun internal dan semakin ketatnya persaingan. Dinamika ini menjadi fenomena baru dalam pembangunan suatu bangsa dalam rangka mencapai kemakmurannya. Dalam proses globalisasi terdapat beberapa ciri antara lain semakin berkembangnya teknologi informasi, perdagangan, transnasionalisasi keuangan dan investasi, serta reformasi politik; yang menjadikan persaingan semakin ketat dalam perdagangan internasional. Setiap negara mempunyai kepentingan ekonomi, politik, sosial, budaya dan kelestarian lingkungan. Atas dasar berbagai kepentingan tersebut, 85 maka berbagai kebijakan dalam pembangunan diterapkan untuk kesejahteraan rakyat, bangsa dan negaranya. Beberapa indikator dalam proses globalisasi antara lain semakin cepatnya perkembangan teknologi informasi, perdagangan, transnasionalisasi keuangan dan investasi, serta reformasi politik. Fenomena ini dapat diamati terutama dalam globalisasi produksi dan globalisasi keuangan. Globalisasi ekonomi atau perdagangan bebas lebih berdampak luas secara internasional, melintas batas negara. Globalisasi produksi dipercepat karena adanya program-program penyesuaian struktural dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) yang digerakkan oleh perusahaan-perusahaan transnasional. Di negara maju, permintaan dalam negerinya yang stagnan dan naiknya biaya produksi, untuk memperluas pasar dan menekan biaya produksi maka perusahaan-perusahaan ini lalu mengalihkan basis produksinya ke negara-negara sedang berkembang. Globalisasi produksi semakin dipercepat oleh kemajuan teknologi, penghematan biaya transportasi dan komunikasi. Sedangkan proses globalisasi keuangan secara nyata memiliki kekuatan yang lebih besar daripada globalisasi produksi. Para ahli ekonomi klasik seperti Adam Smith yakin bahwa perdagangan internasional secara bebas akan memaksimumkan kesejahteraan dunia, sebab perdagangan bebas mengarahkan pada penggunaan sumberdaya yang lebih efisien sehingga akan memaksimumkan produksi dunia. Meskipun perdagangan bebas tersebut diperlukan, namun hal tersebut bukanlah merupakan kondisi yang cukup untuk memaksimumkan kesejahteraan dunia karena masih akan sangat tergantung pada distribusi pendapatan antar individu, antar kelompok, maupun antar negara. Dengan berbagai keunggulannya, negara maju akan lebih banyak menikmati dan mengendalikan kemajuan dunia. Dalam era global,

tenaga kerja dan modal dapat bergerak bebas. Lahan atau tanahpun dapat bergerak bebas apabila yang dimaksudkan adalah penguasaannya. Melalui foreign direct investment (FDI) negara maju dapat mengalihkan basis produksi ke negara-negara sedang berkembang. Oleh karena itu diperlukan analisis internasional yang spesifik mengenai berbagai pertimbangan untuk menyusun kebijakan publik yang mampu mengantisipasi terjadinya perubahan lingkungan internal maupun eksternal. Globalisasi dan Ketahanan Nasional. Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi biasa. Globalisasi memang memiliki sifat mengancam yang menakutkan. Dua kali perang dunia pada abad lalu dipicu oleh persaingan global untuk memperebutkan sumber daya ekonomi. Contoh paling mutakhir: pendudukan Amerika Serikat atas Irak yang telah berlangsung 4 tahun juga menunjukkan hal yang sama meskipun dibungkus dengan berbagai argumen. Pengaruh asing dapat dianalogikan sebagai virus yang menakutkan, namun selama ketahanan nasional sebagai sistem kekebalan tubuh cukup kuat, virus tersebut seharusnya tidak menjadi kekuatan yang mengancam. Polemik dan retorika tidak membantu menciptakan daya saing yang diperlukan untuk terwujudnya Kebangkitan Nasional. Ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa, yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, baik dari luar negeri maupun dalam negeri, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta perjuangan dalam menegakan tujuan nasional Indonesia (Suradinata, 2005:47) Dalam perkembangan dan pertumbuhan negara-negara, sebenarnya tidak ada negara yang terbelakang, melainkan negara yang salah urus atau pengelolaan yang kurang baik (mismanagement, undermanage). Terdapat beberapa bukti sebagai akibat dari kekeliruan dalam kebijakan publik atau manajemen pemerintahan dan pembangunan. Sebagai contoh, terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, penyebab utamanya berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain berkaitan dengan masalah-masalah dalam negeri seperti kondisi sosial-politik dan

keamanan yang tidak stabil, ekonomi biaya tinggi karena inefisiensi dalam proses produksi, praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dan sistem perekonomian yang tidak mengakar ke bawah. Faktor eksternal berkaitan dengan lembaga internasional, seperti pinjaman yang disalurkan utamanya hutang jangka pendek yang ternyata menjadi perangkap, memberatkan negara debitur karena membengkaknya hutang dan bunga hutang sebagai akibat dari terjadinya gejolak mata uang asing khususnya US\$. Dalam sejarah politik dan pemerintahan di Indonesia, tumbangannya pemerintahan Orde Lama pada tahun 1966 disebabkan karena banyaknya tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang menyimpang dari kemurnian Pancasila dan UUD 1945, diantaranya diterapkannya nasakom. Tumbangannya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998 disebabkan karena maraknya penyimpangan dalam penyelenggaraan pembangunan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Penyimpangan tersebut menjadi pendorong terjadinya krisis ekonomi yang hingga saat ini belum terselesaikan bahkan cenderung berkembang menjadi krisis multidimensi yang semakin kompleks. Ini menunjukkan belum mantapnya ketahanan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa kita. Hakekat pembangunan adalah membangun manusia seutuhnya, baik fisik maupun non fisik, jasmani maupun rohani, materiil maupun spirituil, maka pembangunan non fisik, rohani atau spirituil menunjukkan laju yang amat tertinggal bahkan cenderung degradasi. Terjadinya dekadensi moral dan penyakit-penyakit sosial di masyarakat dapat disebabkan karena persoalan ekonomi, ketidakpastian hukum, tidak adanya keteladanan atau rendahnya kendali informasi bagi konsumsi masyarakat yang sedang berkembang, transisi, atau sedang dalam proses modernisasi. Peradaban mengglobal, akal belum rasional, maka nilai-nilai luhur menjadi luntur. Jika mau belajar dari pengalaman, bahwa tekanan ekonomi yang berlarut, lemahnya penegakan hukum dan disiplin, rapuhnya kejujuran dan nilai-nilai moral, merupakan persoalan mendasar yang akan menjadi penyebab terjadinya keruntuhan. Untuk menghadapi pengaruh global, masih terjadi kontroversi antara pemikiran ekonomi pasar murni (liberalisasi perdagangan) dan intervensi pemerintah (proteksionisme). Pada umumnya intervensi pemerintah atau kebijakan publik dimaksudkan untuk membangun kapasitas, menciptakan keadilan, menciptakan kondisi yang stabil, atau proses yang lebih efektif dan efisien. Termasuk didalamnya antara lain alasan untuk memberikan

rangsangan khusus bagi produksi suatu barang tertentu yang masih diimpor (import substitution), memperluas kesempatan kerja, pendayagunaan sumberdaya dan investasi; maupun alasan non ekonomi seperti ketahanan nasional dan distribusi pendapatan atau pemerataan. Jika diamati, kebijakan publik dalam membangun perekonomian misalnya, berbagai bentuk kebijakan sebagai intervensi pemerintah ternyata gagal untuk memberikan kesejahteraan bagi pelaku usaha maupun masyarakatnya, misalnya kesejahteraan petani, peternak, nelayan, petambak maupun usaha kecil, menengah dan koperasi yang cenderung tidak tumbuh dan bergeser dikuasai oleh "petani berdasari" atau pemodal. Tidak efektifnya berbagai kebijakan tersebut dapat disebabkan (a) berbagai distorsi yang terjadi, dan (b) terlalu kuatnya intervensi pemerintah dalam market access yang mengakibatkan disinsentif pada efisiensi, inovasi, teknologi maupun stabilisasi harga. Dalam kasus industri gula, untuk masa 2000–2010, kebijakan tidak menerapkan liberalisasi perdagangan (proteksionisme) ataupun diterapkannya liberalisasi perdagangan (tanpa proteksi), ternyata tidak menunjukkan dampak positif maupun negatif yang signifikan bagi peningkatan keragaan industri gula Indonesia (Abidin, 2000). Hal ini menimbulkan pemikiran yang disebut "kebijakan tanpa kebijakan", artinya no action dalam menghadapi dampak liberalisasi perdagangan, membiarkan begitu saja dampak itu terjadi secara alami, membiarkan pengaruh global itu terjadi menimpa, dan seterusnya. Hal ini mencerminkan kuatnya dampak globalisasi, yang akan menerjang semua halangan dan rintangan. Maka persoalannya adalah kembali kepada menjawab pertanyaan mengapa berbagai kebijakan publik itu tidak efektif dalam mencapai sasarannya (target output, target group). Kebijakan publik yang bagaimana yang mampu melawan kekuatan globalisasi tersebut? Jawaban mendasar untuk itu adalah kebijakan publik yang mampu "kemandirian" yang mengandung makna lebih dari sekedar swa sembada, kemandirian yang mengakar ke bawah tetapi tetap berorientasi ke luar, jadi bukan autarki atau menutup hubungan dengan dunia luar. Sebagai penutup, sejak awal abad 21, terjadi pergeseran paradigma pembangunan dengan persaingan yang semakin ketat. Bagi negara yang sedang berkembang, globalisasi lebih merupakan ancaman daripada peluang, karena ternyata lebih menguntungkan kepentingan negara maju, bahkan memungkinkan untuk menguasai sumberdaya di negara lain. Dalam bidang ekonomi misalnya,

melalui produk-produk impor menyebabkan beberapa komoditi dan produksi di negara sedang berkembang harus keluar (exit) dari pasar karena tidak memiliki daya saing. Berbagai kepentingan setiap negara, sering "rasional secara ekonomi", namun "tidak rasional" ditinjau dari aspek sosial-budaya, distribusi pendapatan, dan Ketahanan Nasional; atau sebaliknya. Ini menunjukkan adanya trade-off antara kepentingan ekonomi dan non ekonomi, atau antara kepentingan tangible dan intangible. Globalisasi ekonomi cenderung mengutamakan efektifitas dan efisiensi (material, tangible) dan cenderung mengorbankan kelestarian lingkungan hidup, keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa, kehidupan berdemokrasi, dan sebagainya (immaterial, intangible). Untuk mengatasi keterpurukan yang terjadi, dengan knowledge saja tidak akan cukup untuk survivalnya suatu kehidupan; bahkan memerlukan nilai-nilai moral yang lebih tangguh sebagai pengendali. Ketangguhan moral akan membangun kemandirian, dan kemandirian akan membangun masyarakat, bangsa dan negara yang lebih hakiki. Modernisasi harus lebih diartikan sebagai continuous improvement dalam segala aspek kehidupan secara berimbang dengan tetap mengedepankan berbagai kearifan lokal untuk skala global. 89

2. Pemerintahan yang Baik, Bersih Dan Berwibawa Krisis nasional yang sedang dihadapi bangsa Indonesia tidak lepas dari kegagalan mengembangkan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang tidak taat azas, tidak taat pada prinsip-prinsip good governance. Reformasi di segala bidang sangat diperlukan untuk menciptakan terobosan baru dalam sistem administrasi negara yang handal dan profesional dengan meningkatkan komitmen dari para penyelenggara negara dan tentu tidak kalah pentingnya peran aktif positif dari seluruh jajaran masyarakat sesuai dengan profesi masing-masing. Generasi muda sebagai salah satu komponen cadangan maupun komponen pendukung dalam pertahanan negara, diharapkan sudah mulai membentuk jati diri, watak dan kepribadian, bahkan sudah mulai berkiprah ditengah komunitas dan masyarakat dengan selalu berpikir dan berbuat yang terbaik bagi diri dan lingkungannya. Dengan demikian pada saatnya akan menjadi sosok yang dibutuhkan masyarakat karena jasa dan pengabdianya. Dalam dalam proses hidup yang penuh dengan pembelajaran, maka konsistensi memegang dan membangun komitmen individu maupun jejaring sosial akan menentukan keberhasillannya. Keberhasilan membangun sistem politik yang

demokratis dan mempertahankan persatuan dan kesatuan, maka pembangunan politik tidak hanya ditentukan oleh faktor dalam negeri, melainkan juga oleh konstelasi politik internasional, sehingga memerlukan penyelenggara negara yang profesional, clean government and good governance. Prinsip-prinsip utama Pemerintahan dan Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa atau sering pula disebut dengan "good government and good governance", yaitu: 1. Partisipasi (participation): kebebasan berasosiasi, menyampaikan pendapat dan berpartisipasi secara konstruktif dalam pengambilan keputusan (decision making) 2. Penegakan hukum (rule of law): penegakan hukum secara adil, tanpa diskriminasi dalam hukum 3. Transparency, Openess: kebebasan arus informasi untuk dipahami dan dipantau 4. Responsive: terhadap "aspirasi masyarakat", melayani stakeholders/ masyarakat 5. Consensus Orientation: menjadi perantara kepentingan yang berbeda, pilihan terbaik, untuk kepentingan yang lebih luas 6. Equity: kesetaraan, memberikan kesempatan yang sama kepada semua stakeholders 7. Effective & Efficient: berdayaguna/sangkil, dan berhasil guna/mangkus 90 8. Accountability: bertanggung jawab kepada publik dan stakeholders 9. Strategic Vision: mempunyai perspektif yang luas dan jauh ke depan, skenario ideal masa depan Perkembangan ke arah good governance dan clean government selaras dengan perkembangan ke arah masyarakat madani, sistim politik yang lebih demokratis, lebih menghargai HAM, peraturan dan hukum sesuai dengan landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional UUD 1945. Dengan tata kelola pemerintahan yang baik, disertai peran aktif positif dari setiap warga negara maka setiap sumberdaya atau kekuatan nasional akan sangat bermakna secara nyata bagi pembangunan. Sebagaimana tercantum dalam Tap MPR Nomor 8, tahun 1998 Bab III, beberapa indikator keberhasilan good governance, yaitu (a) mengatasi krisis ekonomi dalam waktu sesingkat-singkatnya terutama untuk menghasilkan stabilitas moneter yang tanggap terhadap pengaruh global dan pemulihan aktivitas usaha nasional, (b) mewujudkan kedaulatan rakyat dalam seluruh sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara melalui perluasan dan peningkatan partisipasi politik rakyat secara tertib untuk menciptakan stabilitas nasional, (c) menegakkan hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, HAM menuju terciptanya ketertiban umum dan perbaikan sikap mental, serta (d) meletakkan dasardasar kerangka dan agenda reformasi

pembangunan, agama dan sosial budaya dalam usaha mewujudkan masyarakat madani. 3. Kepemimpinan yang Berwawasan Bela Negara Sudah sering kita dengar, bahwa “setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya”. Jadi setiap warga negara adalah pemimpin, yang mempunyai tanggung jawab, dengan kadar kepemimpinan yang berbeda. Kadar kepemimpinan akan menentukan kuantitas dan kualitas penyelesaian masalah. Indonesia Emas, membutuhkan pemimpin duapuluh empat karat, bukan pemimpin se-karat. Disinilah pentingnya meningkatkan kadar kepemimpinan dengan selalu mengasah akal dan fikiran untuk membangun kekuatan individu dalam menghadapi berbagai persoalan hidup, termasuk dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kepemimpinan merupakan upaya mempengaruhi banyak orang melalui komunikasi untuk mencapai tujuan, jadi mencakup cara mempengaruhi orang dengan petunjuk atau perintah, tindakan yang menyebabkan orang lain bertindak, merespon, dan menimbulkan perubahan positif. Dalam kepemimpinan, kekuatan dinamis penting dalam 91 memotivasi, mengoordinasikan organisasi untuk mencapai tujuan. Kemampuan untuk menciptakan rasa percaya diri dan dukungan diantara bawahan untuk mencapai tujuan organisasi. Faktor kepemimpinan terpenting adalah: “sikap dan integritas”. Integritas berarti keadaan lengkap yang merupakan kesatuan, atau satunya kata dengan perbuatan. Jadi berbeda dengan “citra” yang berarti tentang apa yang dipikirkan orang lain tentang diri kita; sedangkan “integritas” adalah siapa diri kita sesungguhnya, Jadi integritas bisa berarti membina kepercayaan, nilai pengaruh tinggi, menghasilkan reputasi yang kuat, menghayatinya sendiri sebelum memimpin orang lain. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Kepemimpinan adalah seni bagaimana mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan. Lebih lengkapnya : “Kepemimpinan adalah rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”. Kepemimpinan merupakan topik yang selalu menarik diperbincangkan dan tidak akan pernah habis dibahas. Masalah kepemimpinan akan selalu hidup dan digali pada setiap masa dari waktu ke waktu

dari generasi ke generasi. Ini dikarenakan untuk mencari formulasi sistem kepemimpinan yang aktual dan tepat untuk diterapkan pada masanya. Ini juga mengindikasikan bahwa paradigma kepemimpinan adalah sesuatu yang sangat tinggi dan memiliki kompleksitas yang tinggi. Kepemimpinan menjadi suatu yang krusial karena pemimpin memiliki peranan vital sebagai dinamisator, motivator, dan motor organisasi. Pemimpin juga menjadi figur panutan organisasi, menentukan kultur (budaya) organisasi serta pemecah kompleksitas atas masalah-masalah yang dihadapi organisasi. Walaupun terjadi perubahan paradigma kepemimpinan, namun dasar-dasar dan azas-azas kepemimpinan yang sangat mendasar harus tetap dipegang teguh. Dihadapkan pada perubahan-perubahan tata kehidupan di era global, sang pemimpin harus jeli menghadapi tantangan dan mengambil keputusan agar roda organisasi tetap berjalan mencapai tujuan. Difahami bahwa kepemimpinan adalah "seni" (art), sekaligus "ilmu terapan" (applied science). Beberapa pendapat tentang pemimpin yang ideal yang pada hakekatnya masih relevan dan sesuai untuk dipedomani para pemimpin masa kini, yaitu :

- 1) George Terry menyatakan bahwa seorang pemimpin harus :
 1. Penuh energi dan sehat jasmani – rohani,
 2. Punya stabilitas dalam perasaan (dapat mengendalikan emosi).
 3. Keinginan memimpin timbul dari dalam nuraninya.
 4. Cakap dalam 92 berkomunikasi,
 5. Memiliki kecakapan teknis dalam perencanaan, pengorganisasian, pendelegasian wewenang, pengambilan keputusan, pengawasan dlsb.
 6. Menghargai pendapat orang lain.
- 2) Keith Davis berpendapat bahwa seorang pemimpin harus :
 1. Punya tingkat kecerdasan yang lebih dari yang dipimpin.
 2. Memiliki kedewasaan dan keluasan hubungan sosial.
 3. Punya dorongan motivasi yang kuat untuk berprestasi,
 4. Mau mengakui harga diri dan kehormatan anggotanya serta berpihak kepadanya.
- 3) Fayol menyatakan bahwa seorang pemimpin seharusnya :
 1. Memiliki jasmani yang sehat dan giat,
 2. Memiliki rohani yang prima,
 3. Memiliki moral yang tegas mau menerima tanggung jawab, berinisiatif, setia, bermartabat, bijaksana,
 4. Memiliki latar belakang pendidikan yang luas baik yang berhubungan dengan fungsinya atau tidak.
- 4) Dalam lingkungan TNI ada pedoman kepemimpinan yang disebut "11 azas kepemimpinan TNI" , yaitu :
 1. Taqwa,
 2. Ing ngarso sung tolodo,
 3. Ing madyo mbangun karso,
 4. Tut wuri handayani,
 5. Waspodo purbo waseso,
 6. Ambeg parama arta,
 7. Prasojo,
 8. Satya,
 9. Gemi nastiti,
 10. Beloko,
 11. Legowo.

Seorang

pemimpin harus memperhatikan kesejarteraan anak buahnya. Pemimpin yang berhasil harus memiliki persyaratan Integritas – Moral – Profesional. Integritas berkaitan dengan kesetiaan, kejujuran, satunya kata dengan perbuatan. Sedangkan moral berhubungan dengan hal yang baik atau buruk. Ada tiga perbuatan buruk yang dapat menjadikan akar permasalahan semua perbuatan tercela, yaitu ♦ curang (cheating), bohong (lying), mencuri (stealing). Pada era global ini, kehidupan manusia telah mengalami perubahan-perubahan fundamental yang berbeda dengan tata kehidupan sebelumnya. Perubahan besar dan mendasar menuntut penangan yang berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Pada masa kini (era global) diperlukan paradigma baru dalam bidang kepemimpinan dalam menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan baru. Dengan demikian urgensi pemahaman kepemimpinan masa kini yang berwawasan kebangsaan (yang sekaligus berwawasan bela negara) sangat mutlak diperlukan oleh para pemimpin dan kader pemimpin suatu organisasi. Kepemimpinan masa kini dan masa depan adalah seorang pemimpin yang adaptif terhadap tantangan, kondisi yang menekan, mampu memelihara kedisiplinan anggotanya, memberikan timbal balik kepada anggotanya serta menjaga kepemimpinannya. 93 Dari hal-hal tersebut diatas, maka kepemimpinan masa kini yang berwawasan kebangsaan hendaknya memiliki empat jenis kompetensi (disamping dilandasi dengan azas-azas kepemimpinan yang sudah ada). Pertama Kompetensi Teknis (Technical Competence) yaitu kompetensi mengenai bidang yang menjadi tugas pokok organisasi. Kedua Kompetensi Manajerial (Managerial Competence) yaitu kompetensi yang berhubungan dengan berbagai kemampuan manajerial yang dibutuhkan dalam menangani tugas-tugas organisasi. Ketiga Kompetensi Sosial (Social Competence) yaitu kemampuan melakukan komunikasi yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas organisasi. Dan yang keempat adalah Kompetensi Intelektual (Intellectual/Strategic Competence) yaitu kemampuan untuk berpikir strategik dengan visi jauh kedepan. Kompetensi Intelektual ini meliputi kemampuan merumuskan visi, misi dan strategi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Untuk membentuk pemimpin yang berwawasan kebangsaan (yang sekaligus berwawasan bela negara), perlu pemahaman dan penghayatan empat kompetensi serta dilandasi dengan azas-azas dan teori kepemimpinan. Bila para pemimpin dan kader pemimpin tersebut telah memahami

dan menghayati hal-hal tersebut, maka secara otomatis memiliki integritas nasional dan jatidiri bangsa. Ujian terpenting dalam kepemimpinan adalah: menciptakan perubahan positif. Kalau anda berhenti berubah, berhenti pula kehidupan anda, Perubahan bisa bermakna pertumbuhan, perubahan tidak terjadi kalau orang berpikir negatif. Berkenaan dengan risiko, ada beberapa pelajaran dari masyarakat, antara lain: jangan berjalan – bisa kesandung, jangan lari – bisa jatuh, jangan hidup – bisa mati. Ini berarti bahwa setiap aktifitas mengandung risiko, keuntungan atau manfaat yang besar sering harus berhadapan dengan risiko yang besar pula. Maka orang yang cerdas dan cerdik akan mengalahkan orang yang bekerja keras. Artinya untuk meraih cita-cita tidak cukup hanya dengan bekerja keras, melainkan harus kecerdasan dan kecerdikan. Inilah penting “individual power”, seperti berbagai sifat unggul yang harus dimiliki, seperti: keuletan, ketangguhan, jujur, disiplin, adil, bisa bekerjasama, peduli, dan sebagainya. Keputusan yang benar, pada waktu yang benar akan mengantarkan pada kesuksesan. Pemimpin terkemuka dilahirkan dengan kualitas kepemimpinan, telah melihat model kepemimpinan sepanjang kehidupannya, telah mempelajari tambahan kepemimpinan melalui latihan, dan mempunyai disiplin pribadi untuk menjadi pemimpin besar (Maxwell, 1995). Wawasan seseorang sangat berkaitan dengan kualitas kepemimpinan. Dalam hal inilah, betapa pentingnya peranan dan tumbuh kembang anak, 94 pemuda dan orang tua, peranan orangtua dalam keluarga, guru dan masyarakat, maupun aparat pemerintah dalam membangun wawasan melalui ketauladanan dan pendidikan formal. Aktualisasi pemimpin dapat berupa menciptakan keadilan, menciptakan kondisi yang stabil, proses yang lebih efektif dan efisien, memberikan rangsangan lebih produktif, memperluas kesempatan kerja, pendayagunaan sumberdaya dan investasi, pemerataan dalam distribusi pendapatan, meningkatkan persatuan, kesatuan, dan ketahanan nasional. Hal tersebut sangat diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seorang pemimpin yang efektif biasanya merasa tidak nyaman dengan “status-quo”. Adakah kerusakan yang perlu diperbaiki? Adakah yang bisa ditingkatkan. Adakah persoalan dalam cara menangani sesuatu? Perubahan apa agar menang dalam persaingan? Mengapa perusahaan kita belum mempunyai reputasi yang baik? Perubahan apa yang akan menaikkan status menjadi istimewa? Cara tercepat untuk menaikkan kadar kepemimpinan adalah kemampuannya dalam

pemecahan masalah. Pemecahan masalah akan memberikan makna bagi kehidupan. Kebijakan bisa berubah, tetapi prinsip tidak pernah berubah. seseorang sukses bisa jadi karena sering gagal. Disisi lain, masalah muncul untuk diatasi, bukan untuk dihindari. Semangat dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah sebelum menjadi keadaan darurat menjadi penting. Kadar kepemimpinan dapat diperhatikan dari ukuran masalah yang ditangani. Untuk membangun sikap yang benar dan tindakan yang tepat, lihat – pikir - kerjakan dengan terus mendengarkan suara hati nurani. Maka kepedulian dan tindakan seseorang untuk mengambil peran bagi kepentingan orang lain, masyarakat, bangsa dan negaranya menentukan kadar kepemimpinan seseorang (individual power). Seberapa bagus kemampuan anda? Untuk membangun kemampuan memberi inspirasi, milikilah daya tarik personal dan jadilah suri tauladan; untuk kemampuan membujuk (persuasi) mengubah pikiran dengan contoh, bukan dengan ancaman atau hukuman; kemampuan memengaruhi (influence), memotivasi, dengan mengubah yang biasa menjadi luar biasa dengan cara menunjukkan arah yang tepat. Sebuah kata-kata bijak perlu direnungkan oleh generasi pembelajar sebagai penerus perjuangan bangsa yaitu bahwa “tidak mungkin bisa memimpin orang lain, jika tidak bisa memimpin dirinya”. 95

4. Kewirausahaan yang Menunjang Kesadaran Bela Negara

Pertahanan hidup terdapat pada keinginan dan kemampuan untuk mempertahankan dan mengembangkan mutu kehidupan, baik hidup dan kehidupan orang-perorang maupun sekelompok masyarakat, bangsa dan negara. Disinilah pentingnya peranan jiwa kewirausahaan yang harus dimiliki oleh setiap orang dengan berbagai profesi, sebab jiwa kewirausahaan berarti kemampuan untuk selalu menumbuhkan kreativitas dan inovasi dalam mengatasi berbagai persoalan, dan tidak terkendala oleh berbagai kekurangan. Benarkah kita membiarkan diri dalam ketidaksuksesan, kemiskinan, keterbelakangan, keterpurukan, terbelenggu oleh kemelut persoalan; atau sudah merasa puas, tidak ada kemampuan dan kemauan, tidak berani menangkap peluang? Jawabannya adalah pada keberaniannya untuk bertindak, dengan mewujudkan gagasan menjadi kenyataan, lakukan jangan hanya bercita-cita dengan penuh keyakinan dimana ada usaha, disitu ada jalan. Di Indonesia, sumberdaya alam yang berlimpah membutuhkan kreativitas dan inovasi untuk kemakmuran rakyat, dengan selalu membangun keunggulan komparatif dan keunggulan bersaing.

Kewirausahaan yang menunjang kesadaran bela negara menjadi salah satu kunci faktor penentu kemajuan suatu bangsa. Kewirausahaan berarti kemampuan menciptakan bisnis baru dengan mengambil risiko dan ketidak pastian untuk memperoleh manfaat, keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang dan menggabungkan sumberdaya yang diperlukan untuk mendirikan nya. Profil wirausahawan nampak dari karakternya yang menyukai tanggung jawab, menyukai risiko, keyakinan atas kemampuan untuk meraih keberhasilan, menyukai kreativitas dan tantangan, terus menerus mencari pengukuhan, energik, berorientasi ke depan, indera yang kuat dalam mencari peluang, trampil mengorganisasi (kelembagaan), menilai prestasi lebih tinggi daripada uang; bukan dorongan untuk menghasilkan uang, uang hanyalah penghitung skor, tujuan adalah simbol prestasi. Karakteristik inilah yang harus kita tumbuhkan, karena begitu besarnya manfaat kewirausahaan bagi kemajuan dan kemakmuran. Beberapa manfaat kewirausahaan, antara lain: peluang mengendalikan nasib sendiri, peluang melakukan perubahan, peluang mencapai potensi sepenuhnya, peluang untuk meraih keuntungan tanpa batas, peluang utk berperan dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan, peluang melakukan sesuatu yang disukai dan menikmatinya. Kewirausahaan akan semakin tumbuh dan berkembang jika mampu mengembangkan organisasi, mengembangkan kelembagaan yang berarti mampu 96 bekerjasama dengan membangun sinergitas dalam kemitraan (partnership). Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, ini sangat bermakna bagi kemajuan usaha karena daripada bersaing saling mematikan, lebih baik bergandeng tangan dan bekerjasama untuk saling melengkapi dan saling menguntungkan; membangun jejaring berarti membangun sinergitas. Jadi sebenarnya membangun jejaring itu berarti memenuhi kebutuhan masyarakat, melalui keteraturan dan integrasi dalam masyarakat. Ini akan berfungsi menjadi pedoman bertindak, menjaga keutuhan dan kebersamaan masyarakat, dan menjadi dasar pengendalian atau sistem pengawasan. Kreativitas setiap warganegara menjadi kebutuhan untuk keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Kreativitas adalah kekuatan untuk menghubungkan sesuatu yang tampaknya tidak berhubungan (William Plomer). Kreativitas: kemampuan untuk mengembangkan gagasan baru untuk menemukan cara baru dalam melihat masalah dan peluang (memikirkan hal-hal baru). Inovasi: kemampuan untuk menerapkan solusi kreatif

terhadap masalah dan peluang tersebut untuk meningkatkan atau untuk memperkaya kehidupan orang-orang (mengerjakan hal-hal baru). Setiap orang bisa belajar teknik dan perilaku untuk menghasilkan gagasan dan pandangan baru yang lebih banyak, dan kemudian melakukannya. Pemikiran kreatif dapat tumbuh dengan dengan selalu mengajukan pertanyaan: adakah cara yang lebih baik?, menantang kebiasaan, rutinitas, dan tradisi; imajinatif, bersemangat bebas, mempunyai jiwa kewirausahaan; menjadi pemikir yang produktif; melihat suatu masalah dari perspektif yang berbeda, menyadari adanya kemungkinan munculnya beberapa jawaban yang tepat, memandang kegagalan sebagai sukses yang tertunda, memandang bahwa suatu masalah adalah batu loncatan bagi ide baru, menghubungkan beberapa gagasan yang nampaknya tidak terkait. Dalam hal inilah imajinasi sangat penting, bahkan imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan terbatas, sedang imajinasi melingkari dunia (Albert Einstein). Terkait dengan kesejahteraan ekonomi, perberbedaan dalam cara memperoleh penghasilan, membutuhkan kerangka berfikir yang berbeda, ketrampilan teknik yang berbeda, pendidikan yang berbeda, pandangan yang berbeda. Dalam proses belajar, betapa pentingnya mendorong mahasiswa berpikir kritis, rasional dan kreatif sebagai warganegara, menanamkan sikap nasionalisme demi membangun dan mempertahankan keutuhan bangsa dan negara; berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta anti korupsi, narkoba, kenakalan remaja dan perilaku tidak terpuji lainnya; menciptakan atmosfir akademik yang memberikan peluang untuk berkembang secara positif dan 97 demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya; berinteraksi dengan bangsabangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi; memotivasi para siswa untuk menerapkan etika dan budi pekerti; mengaktifkan mahasiswa untuk menularkan dan memberi teladan penerapan budi pekerti kepada mahasiswa lainnya. Mengembangkan sifat-sifat pribadi untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan atau entrepreneurship, dapat dilakukan dengan keberanian memulai dengan mengambil keputusan yang tegas: tekad mendapat sifat yang diinginkan, tekad menepati janji; segera bertindak

melaksanakan keputusan itu; kemauan kuat harus dijadikan kebiasaan, jangan menangguk keputusan, laksanakan untuk membentuk sifat-sifat yang baru; lakukan sesuatu yang sukar dengan sengaja: sesuatu yang besar, hasil besar; sesuatu yang berat akan memperkuat kemampuan. 5. Pengembangan Pembinaan dan Pembudayaan Keasadaran Bela Negara Pendahuluan. Di Indonesia maupun bangsa-bangsa di dunia, dalam rangka pembangunan nasionalnya, setidaknya terdapat beberapa isu penting yaitu isu tentang hak azasi manusia (HAM), supremasi hukum, lingkungan hidup, demokratisasi, dan globalisasi ekonomi. Isu-isu tersebut merupakan persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan negara-negara saat ini. Bagi bangsa Indonesia, diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 yang direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah, yang lebih mengutamakan azas desentralisasi kekuasaan dan kewenangan kepada daerah, juga merupakan isu yang diharapkan dapat mendorong percepatan bagi proses pembangunan nasional melalui peningkatan pemberdayaan masyarakat. Sebenarnya globalisasi merupakan suatu pemikiran, ide, sistem, pandangan hidup yang menjadi universal, menjagad atau mengglobal. Berlangsung sejak akhir dekade abad 20, semakin menuntut ketahanan dan daya saing yang tinggi dalam segenap aspek kehidupan bangsa-bangsa. Dalam proses globalisasi terdapat beberapa ciri antara lain semakin berkembangnya teknologi informasi, perdagangan, transnasionalisasi keuangan dan investasi, serta reformasi politik; yang menjadikan persaingan semakin ketat. Setiap negara mempunyai kepentingan, misalnya kepentingan ekonomi, politik, sosial, budaya dan kelestarian lingkungan. Atas dasar kepentingan setiap negara, maka berbagai kebijakan dalam pembangunan diterapkan untuk kesejahteraan rakyat, bangsa dan 98 negaranya, melalui pembangunan fisik maupun non fisik, materiil maupun spirituil, atau jasmani maupun rohani. Jadi pada dasarnya globalisasi merupakan tuntutan sosialisasi dalam kehidupan manusia, yang kemudian sangat besar pengaruhnya dalam memberikan corak dan arah pembangunan setiap negara. Globalisasi dapat digambarkan sebagai proses integrasi antar negara, yang nampak dari proses saling ketergantungan politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya yang berkembang diantara negara-negara di dunia. Kecenderungan globalisasi saat ini ditandai dengan semakin cepatnya perubahan lingkungan eksternal maupun internal dan semakin ketatnya

persaingan. Dinamika ini menjadi fenomena baru dalam pembangunan suatu bangsa dalam rangka mencapai kemakmurannya. Kondisi Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. Di Indonesia, dinamika perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara terus tumbuh dan berkembang seiring dengan kepentingan rakyat, baik yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki, yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan sehingga menambah semakin kompleksnya permasalahan. Beberapa penyimpangan dapat diamati dari berbagai aspek seperti adanya upaya penggantian landasan ideologis bangsa, separatisme (politik), persaingan ketat dalam liberalisasi ekonomi, hedonisme (sosialbudaya), minimnya sarana prasarana pertahanan-keamanan, lemahnya kepastian hukum, ketergantungan pada teknologi negara maju, dampak dari sistem informasi dan komunikasi, persoalan SARA, ketergantungan dan rasa tidak aman, dan sebagainya. Hal ini merupakan gambaran kuatnya pengaruh dari luar negeri atau sekaligus karena lemahnya kondisi internal negara. Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, penyebab utamanya berasal dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal antara lain berkaitan dengan masalah-masalah dalam negeri seperti kondisi sosial-politik dan keamanan yang tidak stabil, ekonomi biaya tinggi karena inefisiensi dalam proses produksi, praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dan sistem perekonomian yang tidak mengakar ke bawah. Faktor eksternal berkaitan erat dengan kepentingan negara-negara kuat yang juga berdampak besar bagi aspek-aspek kehidupan. Dalam pemerintahan Orde Lama pada tahun 1966 banyak tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang menyimpang dari kemurnian Pancasila dan UUD 1945, diantaranya diterapkannya nasakom. Dalam pemerintahan Orde Baru banyak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan pembangunan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Penyimpangan tersebut menjadi pendorong terjadinya krisis ekonomi yang hingga saat ini belum terselesaikan bahkan cenderung berkembang menjadi krisis 99 multidimesi yang semakin kompleks. Ini menunjukkan belum mantapnya ketahanan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa kita. Hal itu semua tentu akan berdampak pada rasa nasionalisme yang nampak dari semakin melemahnya kemampuan menentukan nasib sendiri, kurangnya rasa kebersamaan atau gotong royong, pudarnya karakter bangsa, yang menjadi penyebab munculnya gejala disintegrasi bangsa. Pada hal hakekat pembangunan adalah membangun manusia

seutuhnya, baik fisik maupun non fisik, jasmani maupun rohani, materiil maupun spirituil, maka pembangunan non fisik, rohani atau spirituil menunjukkan laju yang amat tertinggal bahkan cenderung degradasi. Terjadinya dekadensi moral dan penyakit-penyakit sosial di masyarakat dapat disebabkan karena persoalan politik, ekonomi, sosial budaya, ketidak pastian hukum, tidak adanya keteladanan atau rendahnya kendali informasi bagi konsumsi masyarakat, transisi, atau sedang dalam proses modernisasi. Peradaban mengglobal, akal belum rasional, maka nilai-nilai luhur menjadi luntur, misalnya lemahnya disiplin, etika dan budi pekerti yang luntur tidak sesuai jati diri bangsanya. Persoalan politik, tekanan ekonomi, lemahnya penegakan hukum dan disiplin, rapuhnya kejujuran dan nilai-nilai moral, komitmen spiritual yang semakin melemah, kepemimpinan yang semakin kurang berwibawa, semakin rendahnya kesadaran kolektif berbangsa dan bernegara merupakan persoalan mendasar yang akan menjadi penyebab runtuhnya bangsa dan negara.

Pengembangan Nilai-Nilai Dan Pembudayaan Bela Negara. Setiap negara mempunyai kepentingan. Oleh karena itu menghadapi tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan serta berbagai dampak globalisasi memerlukan pemikiran dua arah, yaitu pemikiran untuk kepentingan nasional (ke dalam) dan komitmen pada kepentingan dunia. Untuk menghindari dampak yang lebih besar dalam menghadapi ketidakpastian dunia mendesak untuk memperluas dan memperdalam cakrawala berpikir sebagai warganegara Indonesia pejuang bangsa dalam usaha menciptakan, meningkatkan kesejahteraan dan keamanan nasional untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara demi terwujudnya aspirasi perjuangan nasional, memupuk kesadaran bela negara dan berpikir komprehensif integral (terpadu) dalam rangka ketahanan nasional. Sebagai salah satu upaya strategi mewujudkan hal tersebut yaitu melalui Pendidikan Kewarganegaraan, yang akan membangun kompetensi kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan akan merevitalisasi wawasan kebangsaan yang akan menanamkan kebanggaan sebagai bangsa pejuang, menjadikan Pancasila sebagai acuan kritis dan etika politik dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, menegakkan 100 kedaulatan rakyat, serta menata nilai-nilai fundamental spiritual segenap komponen bangsa melalui pengakuan terhadap kebhinnekaan bangsa. Dengan demikian melalui revitalisasi wawasan kebangsaan ini diharapkan akan meningkatkan kualitas sumberdaya

manusia baik intelektualitas, mentalitas, moralitas maupun fisik/jasmani yang kuat; meningkatkan kesejahteraan dan percaya diri, dan pada akhirnya akan mengembalikan kedaulatan negara setara dengan negara maju, meningkatkan integritas dan mewujudkan satu kesatuan sistem pertahanan negara untuk mencapai tujuan nasional. Berdasarkan Tap MPR Nomor 8, tahun 1998 Bab III, beberapa indikator keberhasilan good governance, yaitu (a) mengatasi krisis ekonomi dalam waktu sesingkat-singkatnya terutama untuk menghasilkan stabilitas moneter yang tanggap terhadap pengaruh global dan pemulihan aktivitas usaha nasional, (b) mewujudkan kedaulatan rakyat dalam seluruh sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara melalui perluasan dan peningkatan partisipasi politik rakyat secara tertib untuk menciptakan stabilitas nasional, (c) menegakkan hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, HAM menuju terciptanya ketertiban umum dan perbaikan sikap mental, serta (d) meletakkan dasar-dasar kerangka dan agenda reformasi pembangunan, agama dan sosial budaya dalam usaha mewujudkan masyarakat madani. Dalam implementasinya, maka kebijakan pemerintah sebagai fasilitator, melalui lembaga-lembaga pendidikan maupun organisasi profesi dan sebagainya mengambil peran aktif untuk mensosialisasikan Pendidikan Kewarganegaraan melalui jalur formal (pendidikan formal), non formal (ketauladanan), sistem pendidikan, efektifitas komunikasi yang integratif. Dengan good governance maka akan mengarahkan pada terciptanya masyarakat madani, sistem politik yang lebih demokratis, lebih menghargai HAM, peraturan dan hukum, serta integritas negara kesatuan Republik Indonesia. Penutup. Kualitas sumberdaya manusia yang meliputi intelektualitas, mentalitas, moralitas maupun fisik/jasmani yang sehat kuat akan menjadi penentu utama keunggulan bangsa dan negara dalam percaturan politik bangsa-bangsa di dunia. Pelembagaan nilai-nilai Pancasila khususnya melalui Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian maupun mata kuliah lainnya menjadi kebutuhan yang bersifat segera dari setiap warga negara, penyelenggara pemerintahan, dan seluruh kekuatan nasional.

101 4.1. Keterampilan Kepemimpinan di Era Global Keterampilan memimpin, sangat tergantung pada kemampuan memahami pihak yang dipimpin. Pemahaman akan "culture system" di Indonesia, meliputi: kebiasaan, selera, norma, nilai-nilai sosial, adat istiadat, heterogenitas, dan sebagainya. Tugas baru pemimpin adalah berupa peran baru

bahwa pemimpin sebagai perancang, guru, penolong; dan keterampilan baru yang nampak dari kompetensi, menjadi "mental model" sebagai tauladan, dan memiliki visi dan skill global (Global Leadership Skills); kemampuan mewujudkan untuk membangun visi bersama (organisasi); berperan dalam pembelajaran; berpikir sistemik dengan piranti-piranti baru yang berbasis ICT atau teknologi informasi dan komunikasi. Pemimpin masa depan adalah pemuda transformasional menjadi harapan bangsa dan negara, yang selalu berpikir tegas, cepat, tepat dan besar. Pemuda multikultural dengan Global Leadership Skills: Continuous capacity to transform, Global Mindset, and Global Networks. Tidak kalah pentingnya sebagai warga negara yakni menciptakan perubahan dan pergeseran positif dalam organisasi untuk mewujudkan cita-cita nasional. Together We Make it Happen: Develop your self, Develop your business, Develop your future. "Memang baik menjadi orang penting, tetapi lebih penting menjadi orang baik".

4.2. Membangun Kemandirian di Era Globalisasi

Menghadapi globalisasi memerlukan pemikiran dua arah, yaitu pemikiran untuk kepentingan nasional dan komitmen pada kepentingan dunia. Sementara itu fair trade disadari oleh semua pihak tidak akan pernah dicapai dalam free trade karena berbagai persoalan dan konflik kepentingan masing-masing negara. Untuk menghindari resiko ketidakpastian inilah mendesak semua negara termasuk Indonesia untuk memacu produksi berbagai macam barang yang dianggap mempunyai keunggulan atau yang bernilai strategis. Menghadapi pasar global, untuk meningkatkan kesejahteraannya, suatu negara menempuh berbagai cara yang pada hakekatnya terletak pada pilihan diantara kebijakan pasar terbuka (trade liberalization) atau tertutup (autarki). Beragamnya jenis maupun tingkat kesiapan berbagai komoditi, ataupun kemampuan suatu negara dalam menghadapi pasar global menyebabkan timbulnya proteksionisme. Proteksionisme tidak hanya diterapkan oleh negara sedang berkembang melainkan juga oleh negara maju. Baik di negara maju maupun negara yang sedang berkembang, umumnya pemerintah selalu turut campur dalam produksi dan perdagangan untuk berbagai kepentingan pemerintah dan negaranya. Negara-negara yang memiliki berbagai kemampuan permodalan, teknologi dan keunggulan sumberdaya lain, selalu berupaya memperluas pasarnya dan sangat memungkinkan timbulnya persaingan ketat di pasar negara lain. Kuatnya intervensi pemerintah, baik di negara eksportir

maupun importir, menyebabkan terdistorsinya pasar dunia dan ketidak pastian dalam penawaran maupun permintaan barang, yang selanjutnya menyebabkan ketidak pastian dalam harga barang. Menghadapi ketidak pastian pasar dunia dan tuntutan kepentingan domestik diperlukan suatu kebijakan publik yang harmonis, dalam arti tetap memelihara komitmen pada ketentuan WTO, tetapi tidak mengorbankan kepentingan domestik. Skema perbandingan masyarakat pasca-industri, terdiri dari masyarakat (a) praindustri atau ekstraktif, yaitu kelompok masyarakat yang modus produksi sektor ekonominya tergolong produk primer seperti pertanian, pertambangan, perikanan, kayu, minyak dan gas; (b) industri, yaitu kelompok masyarakat yang modus produksi sektor ekonominya tergolong produk sekunder seperti menghasilkan barang olahan, proses manufaktur dan konstruksi berat; dan (c) pasca-industri, yaitu kelompok masyarakat yang modus produksi sektor ekonominya tergolong produk tersier (seperti jasa transportasi dan kegunaan), kuarterner (seperti perdagangan, keuangan, asuransi, dan real estate), serta kuinare (seperti kesehatan, riset, pendidikan, pemerintahan, dan rekreasi). Dalam hal tersebut sudah tentu terdapat perbedaan nilai tambah yang cukup signifikan. Bagi Indonesia sebagai negara pengekspor produk primer dari pertanian, gas, minyak bumi dan mineral, ternyata kurang memberikan manfaat yang layak dibanding dengan manfaat yang dinikmati oleh negara importir produk primer tersebut. Negara importir dan pengolah produk primer ternyata memperoleh manfaat yang jauh lebih besar dibanding negara eksportir produk primer. Maka untuk memperoleh nilai tambah yang lebih besar, memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan maka sudah saatnya Indonesia menerapkan langkah (a) untuk mensubstitusi impor, dan selanjutnya mengarahkan produk-produk untuk (b) promosi ekspor. Di negara sedang berkembang, membangun kemandirian biasanya terkendala oleh permodalan, teknologi dan sistim penyelenggaraan pemerintahan. Selaras dengan pergeseran paradigma pembangunan, maka dalam rangka membangun kemandirian bangsa dan negara, diantara ketiga pilar pembangunan (a) public sector, (b) privat sector dan (c) civil society juga mengalami pergeseran peran masing-masing. Peran pemerintah bukan semakin berkurang melainkan perlu penyesuaian dengan dinamika 103 kehidupan masyarakat dan bangsa-bangsa di dunia. Pengertian berkurang lebih diartikan pada pemahaman bahwa sektor swasta

dan masyarakat secara bertahap semakin mandiri dari bantuan dan dukungan pemerintah, seperti berbagai bentuk subsidi input (BBM, tarif listrik, tarif telepon, harga pupuk), subsidi output atau price support (harga gabah, harga gula) dan proteksi dari pemerintah (pajak impor atau bea masuk beras, gula, dan sebagainya) yang lebih cenderung menciptakan distorsi. Dalam hal tersebut bukan berarti bahwa petani, peternak, nelayan, UKM dan koperasi dibiarkan melawan kekuatan raksasa di hulu maupun di hilir, melainkan bahwa pemerintah sebagai fasilitator berarti sebagai penyedia infrastruktur maupun suprastruktur, termasuk sarana dan prasarana, peraturan-peraturan yang memungkinkan berkembangnya sektor riil, UKM dan koperasi, dan sebagainya; yang pada gilirannya juga akan membangun kemandirian masyarakat, bangsa dan negara. Perekonomian merupakan faktor mendasar, yang sekaligus merupakan titik terlemah diantara faktor lainnya. Lemahnya sistem perekonomian domestik dengan berbagai persoalannya antara lain high cost economy, maraknya aktivitas directly unproductive profit seeking, dan morale hazard yang menyebabkan tidak semakin dewasanya infant industry yang selama ini diproteksi dengan sangat kuat. Di Indonesia, kunci keberhasilan membangun kemandirian ekonomi dalam era global antara lain terletak pada (a) upaya peningkatan efisiensi melalui restrukturisasi, rasionalisasi, bahkan reengineering; (b) good-will dari berbagai pihak untuk mencegah terjadinya sistem kapitalisme, atau memberi kesempatan kepada pihak yang lemah untuk mampu berkembang dengan layak, karena tujuan akhirnya adalah meningkatnya kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dan kelangsungan eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia; (c) kemampuan untuk mengambil langkah korektif yang tepat waktu, yang secara politis dapat diterima oleh sebagian besar lapisan masyarakat dan secara ekonomis diterapkan (meskipun secara suboptimal, the theory of second best) demi kepentingan pertumbuhan dan stabilitas (growth and stability); (d) mencegah terjadinya directly unproductive profit seeking (DUP) activities yaitu aktivitas untuk memperoleh keuntungan tanpa melakukan kegiatan produktif secara langsung, misalnya lobi merubah tarif, lobi untuk memonopoli, atau berupaya bebas tarif melalui penyelundupan; serta (e) perlu upaya menghapus sikap morale hazard dikalangan petani dan produsen, yaitu rendahnya kemauan untuk melakukan secara mandiri perbaikan, rendahnya kemauan untuk mencegah terjadinya sesuatu yang

merugikan karena merasa ada pihak lain yang bertanggung jawab atau melindungi.

104 Kemandirian bangsa setara dengan kemerdekaan yang hakiki, lepas dari keterpengaruhan yang merugikan bangsa, jauh dari pengaruh imperialisme dan kolonialisme, atau sekarang lebih sering disebut penjajahan gaya baru, atau neokolonialisme. Kemandirian bangsa merupakan syarat wajib bagi kedaulatan bangsa.

4.3. Mempertahankan Kedaulatan Bangsa dan Negara

Kewaspadaan merupakan sikap mental suatu bangsa yang selalu siap menghadapi tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang timbul setiap saat. Hal ini sangat erat hubungannya dengan ketahanan nasional dan kedaulatan bangsa dan negara. Dalam mencapai tujuan nasional, kewaspadaan nasional juga meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan negara. Menghadapi tantangan dan ancaman pembangunan dalam rangka mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara, memerlukan sikap dan tindakan yang dibangun dari kepedulian dan tanggung jawab setiap warga negara. Tantangan dan ancaman tersebut mulai dari rendahnya kualitas sumberdaya manusia, cepatnya dinamika perubahan masyarakat, gejala disintegrasi bangsa, merebaknya tindak kekerasan dan aksi massa yang memaksakan kehendak, rentan konflik vertikal maupun horizontal, berbagai bentuk penyimpangan dalam penyelenggaraan negara. Merosotnya semangat nasionalisme menjadi keprihatinan semua pihak karena hal tersebut berdampak pada semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai permasalahan terus menerus menghambat pembangunan nasional, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Krisis kepemimpinan dan krisis multidimensi merupakan problema mendasar yang sangat merongrong kemandirian dan kedaulatan bangsa dan negara. Oleh karena itu diperlukan kemampuan mendeteksi dan mengantisipasi terhadap berbagai bentuk ancaman yang berasal dari golongan ekstrim kiri, ekstrim kanan maupun golongan ekstrim lainnya. Mencermati kecepatan pertumbuhan negara-negara maju, terjadinya kesenjangan yang semakin curam antar negara kaya dan miskin, tindakan konsumerisme, dekadensi moral, berbagai bentuk penyimpangan di masyarakat dan penyelenggara negara, bahkan ancaman ideologi nampak semakin gencar. Untuk hal tersebut, paling tidak memerlukan dua arah antisipasi yaitu perbaikan ke dalam dan sekaligus berorientasi keluar. Menegakkan kembali nilai-nilai dan prinsip-prinsip kewargaan (citizenship) dalam pemberdayaan

sumberdaya dan kekuatan nasional mutlak diperlukan. Betapa pentingnya peranan pendidikan karakter dan "nation and character building" yang diarahkan untuk diterapkannya prinsip-prinsip utama pemerintahan dan pemerintahan yang baik, bersih 105 dan berwibawa; dan menciptakan kondusifnya pembangunan nasional yang memperkuat daya saing nasional. Kepemimpinan masa depan memerlukan strong leaderships, dengan integritas, dan berbagai sifat unggul, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, visioner, kemampuan mengenali masalah sebelum menjadi keadaan darurat, menciptakan perubahan positif, transformasional: berpikir tegas, cepat, tepat dan besar; menyadari ada perbedaan (Bhinneka Tunggal Ika), standard kerja tinggi, membangun sinergitas (team work) : orientasi hubungan harmonis (hablun inannaas) dan orientasi tugas tinggi (produktivitas). Dengan demikian perpaduan yang harmonis dari intelektualitas, mentalitas, moralitas dalam fisik yang kuat dari setiap warga negara akan membentuk pribadi unggul: jujur (shiddiq), dapat dipercaya (amanah), menyampaikan (tabligh), dan cerdas (fathonah), menuju cita-cita nasional, dalam negara kesatuan RI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan kepemimpinan dan kemampuan manajerial yang tangguh niscaya kemandirian dan kedaulatan bangsa dan negara akan tumbuh dan berkembang.

Unsur Dasar Bela Negara

Didalam proses pembelaan bangsa, ada beberapa hal yang menjadi unsur penting, diantaranya adalah :

Cinta Tanah Air Kesadaran Berbangsa & bernegara Yakin akan Pancasila sebagai ideologi Negara Rela berkorban untuk bangsa & Negara Memiliki kemampuan awal bela Negara

Contoh-Contoh Bela Negara :

Melestarikan budaya Belajar dengan rajin bagi para pelajar taat akan hukum dan aturan-aturan Negara Dan lain-lain.

Dari unsur yang ada tersebut, bisa disebutkan mengenai beberapa hal yang menjadi contoh proses pembelaan negara.

Beberapa contoh tersebut diantaranya adalah : Kesadaran untuk melestarikan kekayaan budaya, terutama kebudayaan daerah yang beraneka ragam. Sehingga hal ini bisa mencegah adanya pengakuan dari negara lain yang menyebutkan kekayaan daerah Indonesia sebagai hasil kebudayaan asli mereka. Untuk para pelajar, bisa diwujudkan dengan sikap rajin belajar. Sehingga pada nantinya akan memunculkan sumber daya manusia yang cerdas serta mampu menyaring berbagai macam informasi yang berasal dari pihak asing. Dengan demikian, masyarakat tidak akan terpengaruh dengan adanya informasi yang menyesatkan dari budaya asing. Adanya kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Hal ini sebagai perwujudan rasa cinta tanah air dan bela bangsa. Karena dengan taat pada hukum yang berlaku akan menciptakan keamanan dan ketentraman bagi lingkungan serta mewujudkan rasa keadilan di tengah masyarakat. Meninggalkan korupsi. Korupsi merupakan penyakit bangsa karena merampas hak warga negara lain untuk mendapatkan kesejahteraan. Dengan meninggalkan korupsi, kita akan membantu masyarakat dan bangsa dalam meningkatkan kualitas kehidupan.

Dasar Hukum

Beberapa dasar hukum dan peraturan tentang Wajib Bela Negara :

Tap MPR No.VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional. Undang-Undang No.29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat. Undang-Undang No.20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI. Diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988. Tap MPR No.VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI. Tap MPR No.VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI. Amandemen UUD '45 Pasal 30 ayat 1-5 dan pasal 27 ayat 3. Undang-Undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Undang-Undang No.56 tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih

Untuk mewujudkan kesadaran dan menyatukan konsep pembelaan negara di tengah masyarakat, salah satunya dilakukan melalui penciptaan lagu Mars Bela Negara. Mars ini digubah oleh salah seorang musisi Indonesia yang memiliki nasionalisme, yaitu Dharma Oratmangun.

Selain itu, dalam upaya menjaga kesadaran bela negara, dibuatlah sebuah momen untuk memperingatinya. Hari yang sudah ditetapkan sebagai hari Bela Negara dipilih tanggal 19 Desember. Penetapan ini dimulai tahun 2006 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang dituangkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 28 Tahun 2006.

Fungsi dan Tujuan Bela Negara

Tujuan bela negara, diantaranya:

- a. Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara
- b. Melestarikan budayaMenjalankan nilai-nilai pancasila dan UUD 1945
- c. Berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara.
- d. Menjaga identitas dan integritas bangsa/ negara

Sedangkan fungsi bela negara, diantaranya:

Mempertahankan Negara dari berbagai ancaman; Menjaga keutuhan wilayah negara; Merupakan kewajiban setiap warga negara. Merupakan panggilan sejarah;

Manfaat Bela Negara

Berikut ini beberapa manfaat yang didapatkan dari bela negara:

- a. Membentuk sikap disiplin waktu,aktivitas,dan pengaturan kegiatan lain.
- b. Membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan.
- c. Membentuk mental dan fisik yang tangguh.
- d. Menanamkan rasa kecintaan pada Bangsa dan Patriotisme sesuai dengan kemampuan diri.
- e. Melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok.
- f. Membentuk Iman dan Taqwa pada Agama yang dianut oleh individu.
- g. Berbakti pada orang tua, bangsa, agama.
- h. Melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan.
- i. Menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, tidak disiplin.
- j. Membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama.

Contoh bela negara dalam kehidupan sehari-hari di zaman sekarang di berbagai lingkungan:

Menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga. (lingkungan keluarga)

Membentuk keluarga yang sadar hukum (lingkungan keluarga)

Meningkatkan iman dan takwa dan iptek (lingkungan sekolah) Kesadaran untuk menaati tata tertib sekolah (lingkungan sekolah)

Menciptakan suasana rukun, damai, dan aman dalam masyarakat (lingkungan masyarakat)

Menjaga keamanan kampung secara bersama-sama (lingkungan masyarakat)

Mematuhi peraturan hukum yang berlaku (lingkungan negara)

Membayar pajak tepat pada waktunya (lingkungan negara)

Itulah penjelasan bela negara dengan fungsi dan tujuan mengapa bela negara dilakukan, semoga dengan melakukan hal itu manfaatnya bisa dirasakan dan bisa menjadi salah satu bagian dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kita cintai ini.